

LAPORAN HASIL AKTUALISASI
“PEMBUATAN VIDEOGRAFIS PRODUK KAJIAN
DI PUSAT KAJIAN ANGGARAN”

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI ANGKATAN 2018



Disusun Oleh:

Nama : Vita Puji Lestari, S.E.
NIP : 199306092018012002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Instansi : Pusat Kajian Anggaran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DPR RI
2018

LEMBAR PENGESAHAN


LAPORAN HASIL AKTUALISASI

“PEMBUATAN VIDEOGRAFIS PRODUK KAJIAN DI PUSAT KAJIAN ANGGARAN”

Nama : Vita Puji Lestari
NIP : 199306092018012002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Instansi : Pusat Kajian Anggaran

Cisarua, 2 Oktober 2018

Mengetahui,
Coach



Bambang Wiyoso, S.T., M.Si.
NIP.197204112005011001

Menyetujui,
Mentor



Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
NIP.198203042014021003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang mana atas bimbingannya maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS serta Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai salah satu prasyarat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Selesaiannya laporan aktualisasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Drs. Helmizar selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran.
3. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
4. Mardi Harjo, S.E., M.Si., selaku Kepala Bagian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
5. Bambang Wiyoso, S.T., M.Si., selaku *coach* PNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
6. Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., selaku mentor kegiatan Aktualisasi Diklatsar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
7. Hilda Piska Randini, S.I.P., selaku CPNS Penyusun Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran.
8. Teman-teman CPNS sekalian yang saya cintai.

Laporan ini menyajikan dokumentasi atas proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis sebagai Calon Analis APBN Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Maka laporan ini diharapkan besar kecilnya dapat memberikan kontribusi baik dari segi pemikiran, gagasan, maupun memperkaya referensi dan literasi bagi pihak-pihak terkait.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 2 Oktober 2018

Vita Puji Lestari, S.E.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran	1
B. Visi Misi Pusat Kajian Anggaran	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama	3
II. RANCANGAN AKTUALISASI	4
A. Deskripsi Isu	4
B. Pemilihan Isu Prioritas	6
C. Pemilihan Gagasan Prioritas	6
D. Matriks Rancangan Aktualisasi	7
E. Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	13
F. Rancangan Jadwal Kegiatan Aktualisasi	13
III. PELAKSANAAN AKTUALISASI	14
A. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	14
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi	28
IV. PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31
C. Rencana Tindak Lanjut	31
LAMPIRAN	32

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam menjalankan fungsinya terutama terkait fungsi anggaran, maka dibentuklah Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unit *supporting system* di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Kajian Anggaran dahulu merupakan bagian dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang berada di bawah Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan. Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung dan dikeluarkannya Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI maka Pusat Kajian Anggaran resmi dibentuk. Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang perancangan APBN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran;
- h. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

B. Visi Misi Pusat Kajian Anggaran

Visi

”Menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel”

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD sebagai anggota;
- b. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalan data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim;
- c. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC), secara individual, sebagai anggota atau ketua tim;
- d. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC.

BAGIAN II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Isu

1. Belum Optimalnya Minat Baca Anggota DPR RI terhadap Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran

Hasil pemantauan *website* Pusat Kajian Anggaran pada menu “beranda” maupun “produk” menunjukkan bahwa tampilan produk kajian di Pusat Kajian Anggaran (analisis maupun infografis digital) masih berupa tampilan statis. Sementara di beberapa *website* Kementerian/Lembaga sudah mulai banyak menggunakan media komunikasi yang lebih kreatif dan inovatif guna meningkatkan minat pembaca.

Bentuk inovasi dalam hal menemukan alternatif penyajian atau media komunikasi yang menarik menjadi hal yang penting terutama di era digitalisasi saat ini dimana banyak sekali alternatif yang ditawarkan. Selain itu, dalam beberapa kondisi videografis juga sering digunakan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang sedang diperbincangkan ditengah masyarakat. Misalnya videografis yang dipublikasikan oleh Kemenkominfo mengenai “*Kenapa kita butuh impor garam?*”.

Lebih lanjut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mata manusia lebih cepat menangkap informasi yang tersaji dalam bentuk visual dibanding tekstual. Penggunaan media visual juga dapat menciptakan atensi lebih besar untuk membaca substansi yang disampaikan. Selain itu, Mc. Luhan (1996) menyatakan “*Medium is a Message*” bahwa media lebih penting dari pesan yang disampaikan oleh media tersebut.

Mengingat pentingnya metode penyajian terkait efektivitas penyampaian pesan pada pembaca, maka inovasi dalam hal penyajian mejadi hal yang patut dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas produk kajian dalam mendukung kinerja Dewan. Salah satu jenis inovasi penyajian produk hasil kajian selain infografis adalah videografis/*motion graphic*. Videografis adalah representasi audio visual yang bergerak dari suatu data, informasi atau ilmu pengetahuan secara grafis. Hampir serupa dengan infografis, selain hanya memuat representasi visual, infografis juga memuat unsur *audio* dan *motion* (pergerakan).

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran maka dapat dilakukan dengan pembuatan videografis produk kajian di Pusat Kajian Anggaran.

2. Belum Maksimalnya Kemauan Analis APBN untuk Selalu Memperbaharui Pengetahuan atas Isu Ekonomi Terkini

Tuntutan bagi analis Pusat Kajian Anggaran dalam memutakhirkan pengetahuannya dengan isu-isu terkini adalah sebuah keniscayaan. Perubahan lingkungan yang sangat cepat dan keterbatasan waktu pengambilan kebijakan bagi Anggota Dewan menuntut Analis Pusat Kajian Anggaran sebagai bagian dari *supporting system* Dewan untuk dapat cepat tanggap dengan isu terkini. Hal ini tentunya sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas *output* yang dihasilkan.

Pusat Kajian Anggaran sendiri, difasilitasi dengan koran maupun fasilitas internet yang dapat digunakan untuk membaca berita *online*. Fasilitas tersebut tentunya cukup untuk menjadi sarana meningkatkan pengetahuan analis. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut guna meningkatkan kapasitas pengetahuannya masih terbatas pada inisiatif masing-masing individu. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang lebih kuat dalam mendorong kemauan membaca analis. Sehingga diharapkan upaya tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme pegawai.

3. Belum Optimalnya Penggunaan Software Statistik dan Ms. Excel dalam Mengolah dan Menganalisis Data

Dalam melakukan analisis, seorang analis sangat akrab dengan proses pengolahan data. Seringkali analis dihadapkan dengan jumlah data yang sangat banyak dan waktu yang terbatas. Seringkali pula dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data tersebut, ditemukan kesulitan akibat belum optimalnya penggunaan aplikasi pengolahan data. Salah satu penyebabnya adalah terkait pengetahuan cara menggunakan rumus *Ms. Excel* maupun pengoperasian *software* statistik. Akibatnya, tidak jarang pengolahan data dilakukan secara manual. Hal ini jika tidak diatasi akan menghambat efisiensi pekerjaan analis.

Untuk mengatasi hal tersebut, umumnya analis akan mencari referensi baik dari internet maupun buku panduan dari toko buku. Namun panduan tersebut terkadang sulit dimengerti dan juga terlalu banyaknya jenis formula yang dicantumkan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu bimbingan teknis yang memuat secara khusus cara pengoperasian *software* statistik dan penggunaan formula-formula *Ms. Excel* yang sering digunakan.

B. Pemilihan Isu Prioritas

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran	5	5	5	15*
2	Belum maksimalnya kemauan analis APBN untuk selalu memperbaharui pengetahuan atas isu ekonomi terkini	3	3	5	11
3	Belum optimalnya penggunaan <i>software</i> statistik dan <i>Ms. Excel</i> dalam mengolah dan menganalisis data	5	3	4	12

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah :

Isu ke-1 dengan rumusan isu : **Belum Optimalnya Minat Baca Anggota DPR RI terhadap Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran.**

Gagasan :

- Membuat infografis kreatif yang memuat substansi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran;
- Membuat videografis kreatif yang memuat *headline* maupun informasi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran;
- Mengadakan bimbingan teknis penggunaan *software* statistik dan formula *Ms. Excel* kepada pegawai Pusat Kajian Anggaran.

C. Pemilihan Gagasan Prioritas

Matrik Pemilihan Gagasan Prioritas dengan Analisis USG

No	Gagasan	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Membuat infografis kreatif yang memuat substansi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran.	3	3	4	10
2	Membuat videografis kreatif yang memuat <i>headline</i> maupun informasi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran.	4	4	5	13*
3	Mengadakan bimbingan teknis penggunaan <i>software</i> statistik dan formula <i>Ms. Excel</i> kepada pegawai Pusat Kajian Anggaran.	4	3	4	11

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka gagasan yang dipilih adalah :

Gagasan ke-2 terkait pembuatan videografis kreatif yang memuat *headline* maupun informasi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran dengan rumusan gagasan: **“Optimalisasi Penggunaan Videografis dalam Menstimulasi Atensi Pembaca Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran”.**

D. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran

Identifikasi Isu :

1. Belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran*
2. Belum maksimalnya kemauan analis APBN untuk selalu memperbaharui pengetahuan atas isu ekonomi terkini.
3. Belum optimalnya penggunaan *software* statistik dan *Ms. Excel* dalam mengolah dan menganalisis data.

Isu yang Diangkat : **Belum Optimalnya Minat Baca Anggota DPR RI terhadap Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran**

Gagasan Pemecahan Isu :

1. Membuat infografis kreatif yang memuat substansi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran;
2. Membuat videografis kreatif yang memuat *headline* maupun informasi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran;
3. Mengadakan bimbingan teknis penggunaan formula *Ms. Excel* kepada pegawai Pusat Kajian Anggaran.

Gagasan terpilih adalah **membuat videografis kreatif yang memuat *headline* maupun informasi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran.**

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Berkoordinasi dengan Kepala Pusat dan BDTI terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk memakai <i>slot/ruang</i> dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran untuk videografis; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan; 2. Berita Acara pembuatan <i>slot/ruang</i> dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran untuk videografis. 	<p>Sebelum memulai kegiatan konsultasi untuk melihat visibilitas/kemungkinan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, saya akan melapor terlebih dahulu kepada mentor dengan sopan dan beretika (Etika Publik).</p> <p>Kemudian setelah itu, saya akan meminta izin untuk menemui Kepala</p>	Dari kegiatan konsultasi terkait visibilitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi, maka kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni mewujudkan Pusat	Kegiatan konsultasi terkait visibilitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi merupakan suatu upaya untuk berinovasi dalam penyajian produk. Inovasi merupakan unsur yang penting

		<p>3. Melakukan konfirmasi ke BDTI terkait pembuatan <i>slot/ruang</i> dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran untuk videografis;</p> <p>4. Berkoordinasi dengan BDTI dalam rangka membuka akses layanan unggah video di <i>website</i>;</p> <p>5. Membuat <i>slot/ruang</i> dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran untuk videografis.</p>		<p>Pusat (Etika Publik) untuk memohon izin terkait pemakaian <i>slot/ruang</i> di <i>website</i> untuk mengunggah videografis (Komitmen Mutu).</p> <p>Setelah memperoleh izin dari Kepala Pusat, saya akan pergi ke BDTI untuk menanyakan visibilitas pengunggahan video beserta ketentuan-ketentuan teknis terkait videografis tersebut dengan sopan dan beretika (Etika Publik). Jika bisa, maka saya akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk meminta membukakan akses untuk unggah video (WoG).</p>	<p>Kajian Anggaran yang andal dimana upaya penyediaan <i>slot/ruang</i> dalam <i>website</i> tersebut merupakan salah satu upaya organisasi saling berkoordinasi dan bersinergi untuk terus berinovasi dan mencapai tujuannya. Dengan dibukanya media komunikasi alternatif berupa videografis dapat meningkatkan kualitas dukungan kajian untuk publik khususnya Anggota DPR RI.</p>	<p>sebagai perwujudan dari komitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Hal ini akan mendorong terwujudnya Pusat Kajian yang profesional.</p>
2	Merancang konsep dan tampilan videografis	<p>1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor;</p> <p>2. Melakukan kajian terhadap produk kajian yang akan disajikan dalam bentuk videografis;</p> <p>3. Menyusun konsep terkait substansi yang akan dimasukkan ke dalam videografis;</p>	<p>1. Dokumen uraian konsep videografis;</p> <p>2. Dokumen masukan dari mentor terkait konsep videografis.</p>	<p>Sebelum memulai kegiatan konsultasi terkait konsep videografis, saya akan melapor terlebih dahulu kepada mentor dengan sopan dan beretika (Etika Publik).</p> <p>Setelah itu, saya akan mempelajari produk-produk Pusat Kajian Anggaran secara komprehensif dan memilah produk kajian mana yang akan diangkat berdasarkan derajat urgensi dari substansi kajian tersebut (Akuntabilitas) dan tidak subjektif</p>	<p>Kegiatan perancangan konsep dan tampilan videografis yang baik akan membuat kualitas dari <i>website</i> sebagai media komunikasi antara organisasi dan pihak eksternal/ pengguna menjadi lebih baik.</p> <p>Dari konsep yang baik ini, diharapkan dapat memenuhi tujuan dari pembuatan videografis</p>	<p>Kegiatan perancangan konsep dan tampilan dari videografis merupakan suatu upaya pengembangan kemampuan dan kompetensi dari SDM Pusat Kajian Anggaran dimana nilai ini sangat mendukung perwujudan nilai</p>

		<p>4. Menyusun konsep terkait tampilan videografis;</p> <p>5. Meminta masukan mentor atas konsep videografis yang telah dibuat.</p>		<p>atau hanya menampilkan informasi tertentu atas dasar kepentingan individu tertentu (Anti Korupsi).</p> <p>Setelah kajiannya terpilih, maka saya akan menyusun konsep terkait substansi dan tampilan ke dalam videografis dengan mengedepankan konsep inovasi kreatif agar menarik (Komitmen Mutu).</p> <p>Jika konsep telah selesai, maka saya akan meminta mentor dengan sopan santun untuk memberikan masukan perbaikan (Komitmen Mutu).</p>	<p>itu sendiri yakni menstimulasi minat baca pihak luar terhadap hasil kajian organisasi.</p> <p>Dengan meningkatnya minat baca pengguna kajian, maka manfaat kajian pun dapat diwujudkan sehingga misi organisasi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan akan menjadi lebih efektif.</p>	<p>profesionalisme organisasi.</p>
3	Membuat videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran	<p>1. Menerapkan konsep terkait substansi dan tampilan ke dalam pembuatan videografis;</p> <p>2. Membuat videografis</p> <p>3. Berkoordinasi dengan mentor untuk mendapat masukan terkait videografis;</p> <p>4. Melakukan perbaikan videografis jika ada perbaikan.</p>	<p>1. <i>Softfile</i> videografis (sekurang-sekurangnya 1 buah);</p> <p>2. Dokumen masukan dari mentor terkait videografis yang dibuat.</p>	<p>Setelah konsep diselesaikan dan telah diberi evaluasi oleh mentor, maka konsep tersebut akan dituangkan ke dalam proses pembuatan videografis (Komitmen Mutu) secara transparan tanpa menutupi satu informasi dengan tujuan tertentu (Akuntabilitas & Anti Korupsi).</p> <p>Setelah videografis selesai dibuat, saya akan melakukan kegiatan konsultasi kepada mentor untuk mendapat masukan terkait videografis yang dibuat dengan sopan dan beretika (Etika Publik).</p>	<p>Pembuatan videografis ini merupakan salah satu upaya dalam menemukan alternatif media yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan produk kajian di Pusat Kajian Anggaran oleh Anggota Dewan maupun instansi lain yang membutuhkan. Dengan kemanfaatan produk kajian yang meningkat maka diharapkan dapat meningkatkan fungsi</p>	<p>Kegiatan pembuatan videografis merupakan suatu upaya pengembangan kemampuan dan kompetensi dari SDM Pusat Kajian Anggaran melalui kegiatan pembelajaran berkelanjutan dimana nilai ini sangat mendukung perwujudan nilai</p>

					dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, memperkuat manajemen pengetahuan, dan memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.	profesionalisme organisasi.
4	Mengunggah videografis ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Berkoordinasi dengan Pegawai yang berwenang untuk mengelola <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran; 3. Mengunggah videografis ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran 	1. Berita Acara pengunggahan videografis ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran oleh BDTI	<p>Sebelum memulai kegiatan unggah videografis, maka saya akan melapor terlebih dahulu kepada mentor dengan sopan dan beretika (Etika Publik).</p> <p>Setelah melakukan penyesuaian sesuai arahan mentor, maka saya akan berkoordinasi dengan pegawai yang berwenang dalam mengelola <i>website</i> untuk meminta teknis mengunggah <i>file</i> videografis dengan mengedepankan prinsip kerjasama (WoG).</p>	Pengunggahan videografis ke dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran merupakan salah satu upaya dalam menemukan alternatif media yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan produk kajian di Pusat Kajian Anggaran oleh Anggota Dewan maupun instansi lain yang membutuhkan. Dengan kemanfaatan produk kajian yang meningkat maka diharapkan dapat meningkatkan fungsi dukungan kajian anggaran yang	Kegiatan pengunggahan videografis ke depannya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pengembangan kemampuan dan kompetensi dari SDM Pusat Kajian Anggaran melalui kegiatan pembelajaran berkelanjutan dimana nilai ini sangat mendukung perwujudan nilai profesionalisme organisasi.

					<p>mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, memperkuat manajemen pengetahuan, dan memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.</p>	
5	<p>Sosialisasi videografis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan; 2. Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk mengadakan sosialisasi internal terkait videografis; 3. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk persiapan pelaksanaan sosialisasi; 4. Melakukan sosialisasi internal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi; 2. Bahan presentasi sosialisasi; 3. Daftar hadir peserta sosialisasi; 4. Surat undangan sosialisasi. 	<p>Sebelum memulai kegiatan persiapan sosialisasi, saya akan lapor terlebih dahulu kepada mentor dengan sopan dan beretika (Etika Publik).</p> <p>Kemudian, saya akan meminta izin untuk menemui Kepala Pusat (Etika Publik) untuk memohon izin untuk mengadakan sosialisasi (Etika Publik).</p> <p>Setelah diberikan izin oleh Kepala Pusat untuk melaksanakan sosialisasi, maka saya akan berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk berkoordinasi terkait keperluan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi (WoG).</p> <p>Setelah persiapan selesai dilakukan, maka saya akan melakukan sosialisasi internal terkait videografis dengan harapan dapat</p>	<p>Dengan mengadakan sosialisasi terkait keberadaan videografis ke rekan-rekan pegawai dalam lingkup internal diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk berinovasi. Hal ini juga sebagai media untuk berbagi pengetahuan sehingga akan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi yakni terkait manajemen pengetahuan dan kemudian akan berdampak pada terciptanya profesionalitas organisasi melalui pembangunan profesionalisme pegawainya.</p>	<p>Dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, artinya organisasi telah melakukan suatu proses “<i>sharing information</i>” di dalamnya. Dengan adanya proses transfer pengetahuan yang baik dalam organisasi, akan mendorong kompetensi dan semangat inovasi tiap-tiap individu dalam organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya organisasi yang profesional.</p>

				memberikan nilai tambah bagi organisasi (Pelayanan Publik)		
6	Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan kegiatan; 3. Menyusun Laporan Kegiatan; 4. Menyerahkan laporan kegiatan ke atasan. 	Laporan realisasi kegiatan aktualisasi	<p>Setelah kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan, saya akan lapor terlebih dahulu kepada mentor untuk persiapan penyusunan laporan realisasi kegiatan dengan sopan dan beretika (Etika Publik).</p> <p>Kemudian saya akan Mengumpulkan bahan- bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan kegiatan dengan lengkap dan transparan (Akuntabilitas). Serta memasukkan seluruh data yang ada tanpa menutupi untuk tujuan tertentu (Anti Korupsi).</p> <p>Setelah bahan-bahan dan dokumentasi terkumpul, maka saya akan menyusun laporan dengan jujur dan bertanggung jawab serta menyerahkan laporannya jika telah dilakukan pemaparan dan telah dievaluasi (Akuntabilitas).</p>	Dengan melakukan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan maka, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai akuntabilitas yaitu transparansi dan pelaporan.	Dengan melakukan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan maka, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai akuntabilitas dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel.

E. Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat beberapa hal yang diidentifikasi berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan videografis terkait produk kajian di Pusat Kajian Anggaran. Berikut hal-hal yang diidentifikasi berpotensi menjadi kendala selama proses pelaksanaan kegiatan:

1. Kurangnya kemampuan penulis dalam pembuatan videografis karena tidak adanya kemampuan dasar dalam mengelola videografis dikhawatirkan menyebabkan tidak optimalnya penyajian;
2. Kendala teknis yang mungkin muncul saat menyiapkan *slot*/ruang video di *web server* maupun saat melakukan unggah video ke *website* Pusat Kajian Anggaran;
3. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dikhawatirkan menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan akibat pengerjaan tugas pokok jabatan.

F. Rancangan Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Konsultasi terkait visibilitas pelaksanaan gagasan																	
2.	Merancang konsep dan tampilan videografis																	
3.	Membuat videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran																	
4.	Mengunggah videografis ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran																	
5.	Sosialisasi videografis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran																	
6.	Menyusun laporan kegiatan realisasi gagasan																	

Keterangan:

■ Libur Hari Raya

■ Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

BAGIAN III PELAKSANAAN AKTUALISASI

- Isu : Belum Optimalnya Minat Baca Anggota DPR RI terhadap Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran.
- Gagasan : Membuat videografis kreatif yang memuat *headline* maupun informasi penting atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran.
- Judul : Pembuatan Videografis Produk Kajian di Pusat Kajian Anggaran.

A. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

Kegiatan 1	Berkoordinasi dengan Kepala Pusat dan BDTI terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk memakai <i>slot/ruang</i> dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran untuk videografis; 3. Melakukan konfirmasi ke BDTI terkait pembuatan <i>slot/ruang</i> dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran untuk videografis; 4. Berkoordinasi dengan BDTI dalam rangka membuka akses layanan unggah video di <i>website</i>; 5. Membuat <i>slot/ruang</i> dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran untuk videografis.
Output/Evidence	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar konsultasi mentor (terlampir); 2. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (terlampir); 3. Surat Undangan (terlampir); 4. Surat Tugas (terlampir); 5. Daftar Hadir (terlampir); 6. Laporan Hasil Rapat (terlampir); 7. Nota Dinas (terlampir); 8. Dokumentasi.
Tanggal Pelaksanaan	28 Mei – 8 Juni 2018
Hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kegiatan 1 (satu) ini terdapat tahapan kegiatan yang melibatkan unit lain yakni berkoordinasi dengan BDTI. Pada tahapan kegiatan tersebut, awalnya terdapat kekhawatiran mengenai bentuk koordinasi yang akan dilakukan apakah secara informal atau formal. Koordinasi memang akan lebih efektif jika dilakukan melalui prosedur yang formal. Namun untuk itu, diperlukan ijin dan dukungan administrasi dari Kepala Pusat Anggaran agar koordinasi bisa dilakukan secara formal; 2. Atas kegiatan koordinasi tersebut, memunculkan potensi jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur akibat kegiatan koordinasi yang melibatkan berbagai macam pihak yakni BDTI dan beberapa rekan CPNS yang memiliki rancangan aktualisasi terkait <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran/IT. Hal ini menyebabkan beberapa jadwal kegiatan sedikit terlambat dari jadwal yang seharusnya dilaksanakan pada minggu keempat Mei 2018 menjadi lebih panjang hingga minggu pertama Juni 2018; 3. Dikarenakan penulis belum memiliki pengalaman dalam membuat videografis, maka penulis belum memiliki pengetahuan untuk memastikan apakah videografis yang dihasilkan nantinya akan kompatibel atau tidak dengan ketentuan dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran sebagaimana dijelaskan oleh BDTI.

Solusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait persoalan koordinasi dengan unit lain dalam hal ini BDTI, maka penulis berupaya untuk mengkomunikasikan kebutuhan terkait <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran dengan beberapa rekan CPNS yang memiliki keperluan serupa. Kemudian kami berupaya mengkomunikasikan hal tersebut kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran. Setelah mendengarkan kebutuhan kami, maka Kepala Pusat memberikan ijin dan dukungannya dimana untuk mendukung tahapan kegiatan tersebut dibuatkanlah satu pertemuan khusus yang dilaksanakan secara formal melalui surat undangan ke BDTI. Dengan demikian, koordinasi tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif; 2. Terkait permasalahan jadwal, dikarenakan kegiatan selanjutnya yakni pembuatan konsep videografis tidak bergantung secara langsung pada kegiatan koordinasi dengan BDTI maka kegiatan selanjutnya tetap bisa dilaksanakan secara tepat waktu; 3. Setelah penulis mengetahui ketentuan-ketentuan terkait videografis yang akan diunggah, maka dalam proses mempelajari dan memilih jenis <i>software</i> videografis akan mempertimbangkan <i>software</i> yang dapat mengakomodasi ketentuan tersebut.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Kepala Pusat dan BDTI terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini pada intinya merupakan kegiatan permohonan ijin prinsip sekaligus kegiatan konfirmasi awal terkait visibilitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Hal pertama yang penulis lakukan adalah berkoordinasi dengan mentor terkait rencana permohonan ijin prinsip atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi khususnya ijin pengadaan ruang/slot khusus dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran (PKA) untuk produk ‘videografis’. Pada hari Rabu, 30 Mei 2018 penulis meminta contoh Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (SKMK) kepada Staf Penyusun Bahan Kebijakan PKA untuk kemudian membuat SKMK kegiatan aktualisasi. Kemudian penulis menyampaikan draft SKMK tersebut dengan sopan dan beretika kepada mentor untuk kemudian diperiksa dan di paraf (Etika Publik).</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah maksud dan tujuan permohonan izin kegiatan melalui SKMK telah disampaikan kepada mentor, tahapan kegiatan selanjutnya adalah meminta izin kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran. Dengan memerhatikan etika dan kesopanan (Etika Publik), maka penulis menanyakan terlebih dahulu kepada Staf Penyusun Bahan Kebijakan PKA terkait kesediaan Kepala Pusat untuk penulis temui. Setelah Kepala PKA bersedia untuk ditemui, maka dengan sikap hormat dan sopan (Etika Publik) penulis menyampaikan maksud dan tujuan yang tertera dalam SKMK dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga penjelasan penulis dapat diterima dengan baik (Nasionalisme). Kepala PKA pun menyetujui SKMK tersebut yang kemudian surat tersebut ditandatangani dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan konfirmasi dengan pihak BDTI selaku unit yang berwenang dalam mengelola IT dan termasuk di dalamnya <i>website</i> PKA untuk membuka ruang/slot videografis. Pembuatan <i>slot</i> videografis ini merupakan sebuah inovasi dalam hal penyajian hasil analisis di Pusat Kajian Anggaran yang mana hal ini merupakan suatu perwujudan komitmen mutu (Komitmen Mutu) untuk</p>

	<p>meningkatkan kualitas produk organisasi. Kegiatan pertemuan dengan BDTI dibuat dalam bentuk Rapat Dalam Kantor (RDK). Setelah jadwal ditetapkan, dibuatlah Surat Undangan, dan Surat Tugas untuk rapat tanggal 7 Juni 2018. Pada tanggal 7 Juni 2018, masing-masing CPNS Analis APBN menyampaikan rancangan kegiatan aktualisasinya kepada BDTI. Penulis juga menyampaikan maksud dan tujuan serta gambaran kegiatan pembuatan videografis ke BDTI serta menanyakan hal terkait visibilitas pengunggahan videografis dengan sopan dan beretika (Etika Publik).</p> <p>Tahapan kegiatan 4 – Setelah dipastikan kepada pihak BDTI bahwa kegiatan pembuatan videografis mungkin untuk dilaksanakan maka masih pada hari yang sama, dilakukan koordinasi yang merupakan penerapan nilai <i>Whole of Government</i> dimana dipaparkan mengenai format video yang bisa diunggah, berapa durasi maksimum videografis, dan hal-hal teknis lainnya. Atas kegiatan koordinasi dengan BDTI tersebut, dibuat pula daftar hadir rapat dan juga laporan singkat yang memuat catatan rapat dan dokumentasi (Akuntabilitas).</p> <p>Tahapan kegiatan 5 – Kemudian pada tanggal 8 Juni 2018, diadakan rapat lanjutan untuk membuat slot/ruang dalam website Pusat Kajian Anggaran untuk videografis. Hal ini merupakan bentuk lanjutan koordinasi antara penulis dan BDTI dalam mendukung pelaksanaan aktualisasi rapat (<i>Whole of Government</i>). Sama seperti rapat sebelumnya, dibuatlah Nota Dinas, Surat Undangan, dan Surat Tugas. Pada rapat kali ini, BDTI memaparkan mengenai tata letak produk aktualisasi di dalam website PKA, dan juga memaparkan mengenai cara pengunggahan dan berbagai hal teknis lain. Atas kegiatan tersebut, dibuat pula daftar hadir rapat dan juga laporan singkat yang memuat catatan rapat.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Dengan adanya izin dari Kepala Pusat Kajian Anggaran atas penambahan videografis maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa akan datang. Penyediaan slot/ruang dalam website tersebut juga memudahkan pelaksanaan pembuatan videografis di masa mendatang karena sudah ada wadah untuk produk tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka penulis telah berupaya untuk mewujudkan media komunikasi alternatif berupa videografis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan kajian khususnya bagi Anggota DPR RI dan bagi pembaca secara umum. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<p>Kegiatan konsultasi terkait visibilitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi merupakan suatu upaya untuk berinovasi dalam penyajian produk. Inovasi merupakan unsur yang penting sebagai perwujudan dari komitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Hal ini akan mendorong terwujudnya Pusat Kajian Anggaran yang profesional.</p>

Kegiatan 2	Merancang konsep dan tampilan videografis
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Melakukan kajian terhadap produk kajian yang akan disajikan dalam bentuk videografis; 3. Menyusun konsep terkait substansi yang akan dimasukkan ke dalam videografis; 4. Menyusun konsep terkait tampilan videografis; 5. Meminta masukan mentor atas konsep videografis yang telah dibuat.
Output/Evidence	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 2. Konsep Substansi (terlampir); 3. Dokumentasi.
Tanggal Pelaksanaan	30 Mei – 6 Juli 2018
Hambatan	Penyusunan substansi tampilan pada realisasinya melekat pada saat pembuatan videografis. Akibatnya proses konsepsi tampilan diperpanjang sampai dengan proses pembuatan videografis selesai. Hal ini disebabkan karena proses penyusunan konsep tampilan dan substansi itu berbeda. Jikalau konsep substansi bergantung pada dokumen kajian Pusat Kajian Anggaran yang memang pada dasarnya sudah tersedia, sedangkan untuk konsep tampilan akan sangat bergantung pada fitur yang tersedia di dalam <i>software</i> sehingga konsep tampilan baru benar-benar dirancang setelah <i>software</i> dipilih.
Solusi	Memang pada pelaksanaannya, tampilan videografis dirancang pada saat videografis dibuat. Namun untuk tetap menjaga kualitas tampilan, maka sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan yakni pada 28 Mei - 8 Juni 2018 penulis tetap menyusun komponen yang penting untuk dimuat dalam tiap pokok bahasannya sembari konsep tersebut akan berkembang seiring penulis mempelajari fitur pada <i>software</i> dan pada saat proses pembuatan videografis.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pada tanggal 30 Mei 2018, mentor memberikan buku analisis dan brosur infografis Pusat Kajian Anggaran berjudul “<i>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Melalui Percepatan Pembangunan Sektor Perikanan</i>”. Analisis tersebut merupakan topik yang akan diangkat menjadi videografis. Pada tahapan pertama, penulis berkoordinasi terlebih dahulu dengan mentor dengan sopan dan beretika (Etika Publik) bahwa penulis akan menelaah satu analisis terlebih dahulu baru jika memungkinkan maka akan ditambah kuantitasnya.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Pada tahapan selanjutnya, penulis melakukan kajian terhadap analisis tersebut. Penulis membaca analisis ‘<i>Pentingnya Pembangunan Sektor Perikanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia</i>’ secara teliti dan cermat namun tetap memerhatikan ketepatan waktu dalam menganalisis kajian tersebut sehingga penulis bisa mengaktualisasikan nilai Akuntabilitas. Dalam proses ini, penelaahan secara komprehensif dan memilah substansi mana yang masuk berdasarkan derajat kepentingan informasi yang akan dimuat dan tidak bersifat subjektif atau hanya menampilkan informasi tertentu atas dasar kepentingan pihak tertentu sehingga penulis bisa mengaktualisasikan nilai Anti Korupsi.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Setelah membaca kajian tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun konsep substansi setelah proses penelaahan selesai. Konsep substansi dituangkan dalam bentuk substansi per <i>slide</i>. Atas</p>

	<p>substansi yang dimasukkan ke dalam videografis, penulis berupaya untuk menampilkan substansi yang singkat, padat, mudah dipahami karena dalam videografis ini penulis harus berupaya agar pesan dalam analisis dapat tersampaikan tanpa kehilangan esensinya walaupun dengan durasi videografis yang terbatas sehingga penulis bisa mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu. Dalam penyusunan konsep ini, penulis ingin menonjolkan bahwa ada satu sisi masyarakat Indonesia dalam hal ini mereka yang hidup di sektor perikanan untuk dipaparkan kondisi, hambatan dan rekomendasinya dimana diharapkan melalui pemaparan ini dapat didengar Pemerintah maupun DPR dan mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia (Nasionalisme).</p> <p>Tahapan kegiatan 4 – Setelah konsep substansi selesai, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun konsep tampilan. Dalam tahapan ini, terdapat kendala yang menyebabkan perubahan jadwal. Pada pekan pertama Bulan Juni, penulis berupaya mencari referensi dari internet terkait <i>software</i> mana yang dapat digunakan untuk mendukung pengerjaan kegiatan aktualisasi ini. Kemudian setelah libur hari raya, maka penulis memutuskan untuk menggunakan <i>software</i> 'animaker'. Namun sebelum berlangganan, penulis perlu mempelajari cara kerja, fitur dan layanan yang diberikan sehingga barulah bisa menyusun konsep tampilan videografis. Oleh karena itu, dalam menyusun konsep tampilan videografis terjadi perpanjangan jadwal hingga minggu ke-1 Bulan Juli 2018. Proses yang harus dilalui dan dipertimbangkan oleh penulis merupakan suatu upaya untuk menyajikan videografis dengan menarik dan maksimal ditegah keterbatasan sumberdaya yang ada. Hal ini merupakan bentuk Komitmen Mutu penulis terhadap terciptanya videografis yang berkualitas.</p> <p>Tahapan kegiatan 5 – Setelah konsep selesai baik secara substansi maupun tampilan. Maka tahapan selanjutnya adalah meminta masukan mentor terkait konsep yang telah dibuat. Pada tanggal 8 Juni 2018, dokumen yang berisi konsep substansi diberikan kepada mentor dengan sopan santun dan beretika (Etika Publik) untuk kemudian diberikan masukan. Masukan tersebut penulis catat di dokumen konsep dan mentor juga mengisi lembar konsultasi mentor untuk kegiatan kedua. Proses perbaikan melalui reviu dan umpan balik (<i>feedback</i>) merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai macam pendapat guna mengoreksi atau memperbaiki videografis yang mana ini merupakan wujud dari Komitmen Mutu.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Kegiatan perancangan konsep dan tampilan videografis yang baik akan membuat kualitas dari videografis yang akan dibuat sebagai media komunikasi antara organisasi dan pihak eksternal/pengguna menjadi lebih baik. Dari konsep yang baik ini, diharapkan substansi yang disampaikan dapat menjadi lebih tepat kuantitas dan kualitas sehingga tujuan dari pembuatan videografis itu sendiri yakni menstimulasi minat baca pihak luar terhadap hasil kajian organisasi dapat terpenuhi. Dengan meningkatnya minat baca pengguna kajian, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran dan juga mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang Andal atas komitmen terhadap substansi videografis yang berkualitas.</p>

Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan perancangan konsep dan tampilan videografis merupakan suatu upaya pengembangan kemampuan konsepsi dari SDM di Pusat Kajian Anggaran dimana hal ini mendukung perwujudan nilai profesionalisme organisasi. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan produk yang berkualitas dimana hal ini mendukung perwujudan nilai Akuntabel .
----------------------------	---

Kegiatan 3	Membuat videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan konsep terkait substansi dan tampilan ke dalam pembuatan videografis; 2. Membuat videografis; 3. Berkoordinasi dengan mentor untuk mendapat masukan terkait videografis; 4. Melakukan perbaikan videografis jika ada perbaikan.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 2. <i>Softfile</i> videografis (dalam <i>flashdisk</i>). 3. Dokumentasi
Tanggal Pelaksanaan	18 Juli – 15 Agustus 2018
Hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padatnya tugas pokok jabatan mengakibatkan waktu pelaksanaan pembuatan videografis hanya bisa dilakukan diluar jam kerja ataupun pada akhir pekan saja. Setelah penulis diperbantukan di Alat Kelengkapan Dewan (BAKN) maka penulis dihadapkan pada ritme kerja yang cepat sehingga seringkali rekan analis diberikan tugas tambahan yang harus segera diselesaikan pada hari yang sama diluar dari tugas yang telah terjadwal. Hal ini mengakibatkan pembuatan satu videografis memakan waktu yang cukup panjang; 2. Selain padatnya tugas, pembuatan videografis juga sangat terkendala oleh batasan waktu berlangganan software dimana hal ini berakibat pada kuantitas maupun kualitas dari produk videografis yang dihasilkan karena harus dikerjakan secara cepat; 3. Keterbatasan waktu berlangganan <i>software</i> videografis disebabkan karena belum adanya dukungan pendanaan yang memadai dan masih bersumber dari pendanaan pribadi sehingga kuantitas videografis yang dihasilkan masih terbatas; 4. Jenis layanan penyedia jasa yang dipilih merupakan layanan dengan biaya terendah sehingga kualitas dan variasi tampilan videografis masih standar; 5. Kemampuan pembuat videografis yang tidak memiliki pelatihan khusus serta keterbatasan lain dalam pembuatan videografis ini juga menyebabkan tampilan videografis belum optimal dan latar belakang suara (<i>backsound</i>) yang tidak stabil serta proses pembuatan yang memakan waktu lama akibat beberapa pekerjaan masih dilakukan secara manual (mengambil <i>icon</i> dari internet);

Solusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis disiplin dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas aktualisasi sesegera mungkin saat ada waktu luang sehingga pengerjaan videografis dilakukan setiap ada waktu senggang sehingga target untuk menyelesaikan videografis sebelum waktu berlangganan habis bisa terpenuhi; 2. Untuk efisiensi waktu pengerjaan, maka dalam pembuatan videografis, digunakan tampilan berupa <i>list</i>, sehingga pengerjaan bisa lebih cepat dibanding menggunakan animasi secara penuh; 3. Dikarenakan kegiatan ini sifatnya masih '<i>pilot project</i>', maka penulis baru bisa membuat satu buah videografis dengan kualitas tampilan standar dan belum '<i>High Definition (HD)</i>' serta waktu berlangganan yang masih terbatas. Namun meski demikian, penulis berupaya mengkompensasi keterbatasan tersebut dengan mengerahkan seluruh kreativitas penulis agar videografis tetap terlihat menarik meskipun terdapat berbagai keterbatasan; 4. Terkait fitur yang masih standar, sama seperti masalah keterbatasan waktu maka penulis berupaya mengkompensasi keterbatasan tersebut dengan mengerahkan seluruh kreativitas penulis agar videografis tetap terlihat menarik. Salah satunya adalah dengan mencari dan mengedit sendiri <i>icon-icon</i> dari internet untuk mendukung tampilan videografis yang lebih menarik; 5. Terkait kemampuan penulis dalam pembuatan videografis yang bersifat otodidak, maka hal ini memang membuat waktu pengerjaan menjadi lebih lama karena beberapa proses pada akhirnya dilakukan secara manual. Untuk itu, penulis berupaya secara mandiri untuk mencari tutorial di internet.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pada tahapan kegiatan pembuatan videografis ini, awalnya direncanakan pada 25 Juni - 17 Agustus 2018 namun realisasinya baru dimulai pada 18 Juli 2018. Hal ini dikarenakan pertimbangan waktu berlangganan <i>software</i> yang direncanakan maksimum dua bulan terhitung mundur dari pertengahan September. Oleh karena itu, akibat terbatasnya waktu dan biaya berlangganan maka waktu pengerjaan baru dimulai pada 18 Juli 2018. Setelah konsep diselesaikan dan dievaluasi oleh mentor, maka konsep tersebut kemudian dituangkan ke dalam proses pembuatan infografis. Mengaplikasikan saran perbaikan di tiap tahapannya merupakan komitmen perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) dimana hal tersebut merupakan bentuk bahwa penulis telah mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Penulis mulai mencari-cari <i>software</i> pada 23 Mei 2018, pada masa tersebut penulis berupaya mempelajari terlebih dahulu fitur yang ada untuk menilai apakah <i>software</i> tersebut cukup mengakomodasi kebutuhan pembuatan videografis. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan kualitas videografis yang akan dihasilkan nantinya sehingga hal ini menunjukkan bahwa penulis telah mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu. Sembari mempelajari cara kerja <i>software</i> tersebut, penulis merekam transkrip substansi yang telah dibuat menjadi sebuah file audio untuk kemudian disisipkan sebagai latar belakang suara (<i>backsound</i>) videografis. Dalam perekaman tersebut, penulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang mengaktualisasikan nilai Nasionalisme melalui pengamalan Sila ke-3 butir ketujuh yakni memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Setelah semua komponen siap, kemudian pada 20 Juli 2018 penulis</p>

	<p>mulai berlangganan <i>software</i> tersebut. Artinya, pembuatan videografis benar-benar dimulai. Selama proses yang panjang dalam pembuatan videografis ini, penulis senantiasa melaporkan perkembangan kegiatan (<i>progress report</i>) kepada mentor secara berkala dengan memerhatikan aspek etika dan kesopanan (Etika Publik) sekaligus sebagai wujud Akuntabilitas penulis atas kegiatan aktualisasi yang sedang dilaksanakan. Proses pembuatan videografis akhirnya selesai pada 15 Agustus 2018. Dalam proses pembuatannya, videografis disusun secara objektif dan transparan tanpa menutupi atau mengungkap suatu informasi dengan tujuan tertentu dan memang sesuai dengan substansi yang tertera dalam analisis sehingga penulis telah mengaktualisasikan nilai Anti Korupsi.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 dan 4 – Setelah videografis selesai dibuat dan tersedia dalam bentuk <i>soft file</i>, maka pada tanggal 15 Agustus 2018 penulis berkoordinasi dengan mentor dengan sopan santun (Etika Publik) untuk memperoleh masukan dimana ada masukan agar sebelum bagian '<i>Evaluasi Dukungan Anggaran melalui Belanja Pemerintah Pusat</i>' dan '<i>Rekomendasi</i>' agar ditambahkan pengantar terlebih dahulu. Dan atas masukan tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2018, telah selesai dilakukan perbaikan. Mengaplikasikan saran perbaikan di tiap tahapannya merupakan komitmen perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) dimana hal tersebut merupakan bentuk bahwa penulis telah mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Pembuatan videografis ini merupakan salah satu upaya dalam menemukan alternatif media yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan produk kajian di Pusat Kajian Anggaran oleh Anggota Dewan maupun instansi lain yang membutuhkan. Dengan kemanfaatan produk kajian yang meningkat maka diharapkan dapat meningkatkan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, memperkuat manajemen pengetahuan, dan memperkuat pengembangan profesi Analis APBN. Melalui proses pembuatan videografis ini, penulis juga banyak belajar hal-hal baru dimana hal ini sangat penting untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam organisasi. Hal – hal tersebut mendukung terwujudnya Pusat Kajian Anggaran yang Profesional, Andal, dan Akuntabel.</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<p>Kegiatan pembuatan videografis merupakan suatu upaya pengembangan kemampuan kompetensi teknis penyajian Produk Kajian oleh SDM di Pusat Kajian Anggaran dimana hal ini mendukung perwujudan nilai profesionalisme organisasi. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan produk yang berkualitas dimana hal ini mendukung perwujudan nilai Akuntabel.</p>

Kegiatan 4	Mengunggah videografis ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Berkoordinasi dengan pegawai yang berwenang untuk mengelola <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran; 3. Mengunggah videografis ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran
Output/Evidence	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 2. Surat Ijin Unggah dan Sosialisasi Videografis (terlampir); 3. Berita Acara Unggah Videografis (terlampir); 4. Nota Dinas (terlampir); 5. <i>Screen Capture</i> Videografis di Website Pusat Kajian Anggaran (terlampir).
Tanggal Pelaksanaan	28 Agustus 2018
Hambatan	-
Solusi	-
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Tahapan pertama yang penulis lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor terkait rencana pengunggahan videografis di <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran. Dalam konsultasi tersebut, penulis menyampaikan dengan sopan dan beretika (Etika Publik) terkait maksud dan tujuan penulis untuk melakukan pengunggahan videografis ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran dan mentor pun mengingatkan agar sebelum melakukan unggah videografis agar terlebih dahulu meminta ijin prinsip kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran agar unggahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas). Setelah itu, penulis segera membuat Surat Permohonan Ijin unggah videografis sekaligus sosialisasi videografis. Setelah surat tersebut selesai, maka penulis segera berkoordinasi dengan Penyusun Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran untuk menemui Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk meminta ijin. Pada tanggal 28 Agustus 2018, penulis menghadap Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk meminta izin pengunggahan dokumen dan sosialisasi dengan sopan dan beretika (Etika Publik) dan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (Nasionalisme).</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah mendapatkan izin unggah, maka penulis melakukan tahapan selanjutnya yaitu proses pengunggahan videografis. Pada saat koordinasi awal dengan pihak BDTI, beberapa rekan yang memiliki proyek terkait <i>website</i> diberikan akses untuk melakukan unggah ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran berdasar pada Nota Dinas yang telah dibuat tertanggal 7 Juni 2018 sehingga penulis dapat melakukan unggah di <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran. Namun penulis tetap berkoordinasi dengan mentor, bahwa penulis telah mendapat ijin unggah dan akan segera melakukan pengunggahan videografis sehingga dengan ini penulis telah mengaktualisasikan Whole of Government (WoG). Pengunggahan videografis ini menambah jenis produk Pusat Kajian Anggaran (Komitmen Mutu).</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Pada hari yang sama yakni 28 Agustus 2018, penulis melakukan unggah videografis ke <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran dan melaporkannya kepada mentor. Atas pengunggahan tersebut, sebagai bukti serah terima maka dibuatlah Berita Acara Pengunggahan Videografis yang</p>

	ditandatangani oleh mentor selaku pihak yang juga memiliki wewenang atas <i>website</i> PKA sekaligus pihak yang memang bertempat di Pusat Kajian Anggaran dan juga ditandatangani Kepala Pusat Kajian Anggaran. Melalui kegiatan ini, maka penulis telah mengaktualisasikan nilai Whole of Government (WoG) .
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan adanya kesempatan untuk mengunggah videografis ke dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran, maka suatu konsep baru dalam penyajian analisis telah memiliki suatu wadah pendistribusian yang memadai. Dengan semakin banyak pembaca yang melihat videografis ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan produk kajian di Pusat Kajian Anggaran. Dengan kemanfaatan produk kajian yang meningkat maka diharapkan dapat meningkatkan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, memperkuat manajemen pengetahuan, dan memperkuat pengembangan profesi Analis APBN untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang Professional, Andal dan Akuntabel .
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan pengunggahan videografis ke depannya diharapkan dapat menjadi salah satu media bagi SDM Pusat Kajian Anggaran untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran berkelanjutan terkait videografis dimana nilai ini sangat mendukung perwujudan nilai Profesionalisme organisasi.

Kegiatan 5	Sosialisasi videografis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan; 2. Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk mengadakan sosialisasi internal terkait videografis; 3. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk persiapan pelaksanaan sosialisasi; 4. Melakukan sosialisasi internal.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 2. Surat Ijin Unggah dan Sosialisasi Videografis (terlampir); 3. Surat Undangan Sosialisasi (terlampir); 4. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi (terlampir); 5. Laporan Singkat Kegiatan Sosialisasi (terlampir); 6. Dokumentasi.
Tanggal Pelaksanaan	31 Agustus 2018
Hambatan	Koneksi internet yang bermasalah pada saat penayangan videografis dalam proses sosialisasi menyebabkan terjadinya 'buffering' dan kegiatan menjadi sedikit terganggu.
Solusi	Penulis menyiapkan videografis dalam bentuk flashdisk sebagai <i>back up</i> meskipun pada pelaksanaannya tidak digunakan karena koneksi internet sudah kembali seperti semula.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Kegiatan kelima adalah sosialisasi videografis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran. Hal pertama yang penulis lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor terkait waktu pelaksanaan sosialisasi dengan sopan dan beretika (Etika Publik). Dari hasil konsultasi tersebut, disepakati jika sosialisasi akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 31 Agustus 2018.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, penulis telah meminta ijin terlebih dahulu dengan sopan dan beretika (Etika Publik) kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran yang mana ijin tersebut diminta bersamaan saat meminta ijin unggah videografis. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan sosialisasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas) Oleh Karena itu, perizinan tersebut sudah tertuang dalam Surat Permohonan Ijin unggah videografis sekaligus sosialisasi videografis yang ditandatangani Kepala Pusat Kajian Anggaran tertanggal 28 Agustus 2018.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Setelah dasar untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terpenuhi, maka penulis segera memberitahukannya kepada Staf Penyusun Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan berkoordinasi terkait teknis kegiatan sosialisasi meliputi jam, tempat, peserta dan durasi sosialisasi sehingga dengan ini penulis telah mengaktualisasikan nilai Whole of Government (WoG). Setelah koordinasi dilakukan, maka dibuatkanlah Surat Undangan Sosialisasi tertanggal 31 Agustus 2018.</p> <p>Tahapan kegiatan 4 – Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 puku 10.10, peserta sosialisasi telah memasuki ruang rapat Pusat Kajian Anggaran. Kemudian sosialisasi dibuka oleh Bapak Robby Alexander Sirait S.E., M.E. selaku mentor penulis yang kemudian memaparkan maksud dan tujuan</p>

	<p>sosialisasi tersebut dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (Nasionalisme). Setelah dibuka oleh mentor, maka penulis dipersilahkan untuk memaparkan produknya. Kemudian dengan bahan sosialisasi yang telah disiapkan berupa <i>soft file</i> videografis itu sendiri dan <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran, maka penulis langsung memaparkan mengenai maksud dan tujuan pembuatan videografis, fitur dari <i>software</i> yang digunakan, tata letak videografis dalam <i>website</i> hingga pemutaran videografis. Setelah proses pemutaran videografis, peserta nampak antusias ditunjukkan dengan adanya beberapa pertanyaan terkait videografis ini. Rangkaian proses pembuatan videografis hingga tahapan sosialisasi ini, dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan nilai tambah bagi unit dan organisasi (Pelayanan Publik). Sehingga dengan demikian, penulis memahami peran dan kedudukan PNS dalam NKRI salah satunya sebagai Pelayan Publik. Atas pelaksanaan sosialisasi tersebut dibuatlah Daftar Hadir Peserta Sosialisasi dan Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Dengan mengadakan sosialisai terkait keberadaan videografis ke rekan-rekan pegawai dalam lingkup internal diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk berinovasi. Hal ini juga sebagai media untuk berbagi pengetahuan sehingga akan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi yakni terkait manajemen pengetahuan dan kemudian akan berdampak pada terciptanya profesionalitas organisasi melalui pembangunan profesionalisme pegawainya. Dengan mengadakan sosialisai terkait keberadaan videografis ke rekan-rekan pegawai dalam lingkup internal diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk berinovasi. Hal ini juga sebagai media untuk berbagi pengetahuan sehingga akan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi yakni terkait manajemen pengetahuan dan kemudian akan berdampak pada terciptanya profesionalitas organisasi melalui pembangunan profesionalisme pegawainya.</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<p>Dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, artinya organisasi telah melakukan suatu proses "<i>sharing information</i>" di dalamnya. Dengan adanya proses transfer pengetahuan yang baik dalam organisasi, akan mendorong kompetensi dan semangat inovasi tiap-tiap individu dalam organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya organisasi yang profesional.</p>

Kegiatan 6	Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan kegiatan; 3. Menyusun Laporan Kegiatan; 4. Menyerahkan laporan kegiatan ke atasan.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir). 2. Laporan Realisasi Kegiatan Aktualisasi.
Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus – 30 September 2018
Hambatan	<p>Belum tersedianya peralatan untuk <i>print</i> dan <i>fotocopy</i> menyebabkan proses pencetakan laporan kegiatan aktualisasi menjadi sedikit menemui kendala. Sedangkan ada banyak sekali lampiran dan laporan yang harus di <i>print</i> dan di <i>fotocopy</i>. Terlebih untuk cetak berwarna, yang belum tersedia. Dalam proses penyusunan laporan realisasi umumnya akan terjadi perbaikan berulang. Dengan keterbatasan ini, maka menjadi kendala tersendiri bagi penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi.</p>
Solusi	<p>Penulis berupaya untuk menyusun lampiran dan memfotocopy jauh hari sebelum pelaksanaan seminar akhir. Hal ini untuk mencegah antrian rekan CPNS lain. Kemudian, sebelum mencetak laporan akhir, penulis melakukan pemeriksaan berulang agar tidak terjadi proses cetak yang berulang.</p>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Kegiatan keenam adalah Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan terakhir ini, tahapan yang pertama kali dilakukan adalah berkonsultasi dengan mentor bahwasanya setelah serangkaian kegiatan aktualisasi ini, selanjutnya adalah tahapan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Hal ini disampaikan penulis dengan sopan dan beretika (Etika Publik).</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah melaporkan rencana kegiatan kepada mentor, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan menata segala dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun laporan kegiatan aktualisasi secara lengkap dan transparan. Hal ini merupakan wujud jika penulis telah mengaktualisasikan nilai Akuntabilitas.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Setelah dokumen-dokumen mulai dari kegiatan pertama sampai terakhir terkumpul dan tertata rapi, maka penulis kemudian menyusun laporan kegiatan aktualisasi dengan jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini merupakan wujud jika penulis telah mengaktualisasikan nilai Anti Korupsi. Penulisan laporan ini disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (Nasionalisme).</p> <p>Tahapan kegiatan 4 – Setelah <i>draft</i> laporan aktualisasi selesai dibuat, maka laporan ini akan diberikan kepada coach dan mentor untuk diberikan masukan maupun koreksi. Penulis juga melakukan koreksi berulang sebelum di cetak (Komitmen Mutu). Setelah itu, melalui tahapan pemaparan dan evaluasi akhir, maka melalui laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban penulis atas kegiatan yang dirancang selama masa habituasi ini. Upaya penulis untuk membuat laporan aktualisasi yang baik adalah untuk mewujudkan nilai Akuntabilitas.</p>

Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan pelaporan terhadap kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan maka, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai akuntabilitas yaitu transparansi dan pelaporan . Dengan pegawai yang akuntabel terhadap pekerjaannya turut mendukung bagi terwujudnya Pusat Kajian Anggaran yang Akuntabel .
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan maka, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai akuntabilitas dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel .

B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No.	Kegiatan/tahapan kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agustus					September			
		W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4
1	Berkoordinasi dengan Kepala Pusat dan BDTI terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi																		
1.1	Melaporkan pelaksanaan kepada mentor																		
1.2	Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk memakai slot dalam website Pusat Kajian Anggaran untuk videografis																		
1.3	Melakukan konfirmasi ke BDTI terkait pembuatan slot dalam website Pusat Kajian Anggaran untuk videografis																		
1.4	Berkoordinasi dengan BDTI dalam rangka membuka akses layanan unggah video di website																		
1.5	Membuat slot dalam website Pusat Kajian Anggaran untuk videografis																		
2	Merancang konsep dan tampilan videografis																		
2.1	Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor																		
2.2	Melakukan kajian terhadap produk kajian yang akan disajikan dalam bentuk videografis																		
2.3	Menyusun konsep terkait substansi yang akan dimasukkan ke dalam videografis																		
2.4	Menyusun konsep terkait tampilan videografis																		
2.5	Meminta masukan mentor atas konsep videografis yang telah dibuat																		
3	Membuat videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran																		
3.1	Menerapkan konsep terkait substansi dan tampilan ke dalam pembuatan videografis																		
3.2	Membuat videografis																		
3.3	Berkoordinasi dengan mentor untuk mendapat masukan terkait videografis																		
3.4	Melakukan perbaikan videografis jika ada perbaikan																		
4	Mengunggah videografis ke website Pusat Kajian Anggaran																		
4.1	Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor																		
4.2	Berkoordinasi dengan pegawai yang berwenang untuk mengelola website Pusat Kajian Anggaran																		
4.3	Mengunggah videografis ke website Pusat Kajian Anggaran																		
5	Sosialisasi videografis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran																		
5.1	Berkoordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi																		
5.2	Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk mengadakan sosialisasi internal terkait videografis																		
5.3	Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk persiapan pelaksanaan sosialisasi																		
5.4	Melakukan sosialisasi internal																		
6	Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi																		
6.1	Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor																		
6.2	Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan kegiatan																		
6.3	Menyusun laporan kegiatan																		
6.4	Menyerahkan laporan kegiatan ke atasan																		

Pelaksanaan Aktual Libur Lebaran

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang tertera pada rancangan awal, kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan koordinasi dengan Kepala Pusat dan BDTI terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi.

Dalam rancangan aktualisasi yakni untuk tahapan kegiatan nomor 1.3, 1.4 dan 1.5 terkait koordinasi dengan BDTI untuk penyediaan ruang/slot dalam *website* yang pada awalnya direncanakan pada 28 Mei - 1 Juni 2018 namun realisasi tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal tanggal 7 dan 8 Juni 2018. Perubahan jadwal tersebut disebabkan karena koordinasi dengan BDTI membutuhkan kesesuaian waktu antara kedua belah pihak baik dari unit Pusat Kajian Anggaran maupun dari BDTI sendiri sehingga tahapan kegiatan mengalami perubahan jadwal satu pekan dari jadwal semula.

2. Kegiatan merancang konsep dan tampilan videografis.

Dalam rancangan aktualisasi yakni untuk tahapan kegiatan nomor 2.4 terkait tahapan kegiatan menyusun konsep tampilan videografis yang pada awalnya direncanakan pada 28-31 Mei 2018 namun pada realisasinya dilaksanakan pada 28 Mei – 16 Agustus 2018 (10-23 Juni Libur Hari Raya Idul Fitri). Perubahan jadwal tersebut disebabkan karena proses penyusunan konsep tampilan dan substansi itu berbeda. Jikalau konsep substansi bergantung pada dokumen kajian Pusat Kajian Anggaran yang memang pada dasarnya sudah tersedia, namun untuk konsep tampilan akan sangat bergantung pada fitur yang tersedia di dalam *software* menyebabkan konsep tampilan baru bisa dirancang setelah *software* dipilih. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga kualitas tampilan, maka sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan yakni pada 28 Mei - 8 Juni 2018 penulis tetap menyusun komponen yang penting untuk dimuat dalam tiap pokok bahasannya sembari konsep tersebut akan berkembang seiring penulis mempelajari fitur pada *software* dan pada saat proses pembuatan videografis.

3. Kegiatan pembuatan videografis.

Dalam rancangan aktualisasi yakni untuk tahapan kegiatan nomor 3.1 dan 3.2 terkait tahapan kegiatan pembuatan videografis yang pada awalnya direncanakan pada 25 Juni - 17 Agustus 2018 namun pada realisasinya baru dimulai pada 18 Juli 2018. Hal ini dikarenakan pertimbangan waktu berlangganan *software* yang direncanakan maksimum dua bulan terhitung mundur dari pertengahan September. Oleh karena itu, akibat terbatasnya waktu dan biaya berlangganan maka waktu pengerjaan baru dimulai pada 18 Juli 2018.

4. Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi

Penyusunan laporan aktualisasi pada awalnya akan dilaksanakan selama periode 23 Juli - 29 September 2018 atau sepanjang masa aktualisasi. Namun pada pelaksanaannya baru dimulai setelah penulis melaksanakan seluruh tahapan aktualisasi yaitu tanggal 16 Agustus 2018. Hal ini disebabkan karena padatnya tugas pokok penulis.

BAGIAN IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, maka telah diaktualisasikan pula nilai-nilai dasar PNS serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Enam kegiatan yang telah diaktualisasikan di tempat kerja selama rentang waktu 23 Mei sampai dengan 30 September 2018 yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat dan BDTI terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, nasionalisme, komitmen mutu, akuntabilitas, dan *Whole of Government*.
2. Merancang konsep dan tampilan videografis dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme dan komitmen mutu.
3. Membuat videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah komitmen mutu, akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme, dan etika publik.
4. Mengunggah videografis ke *website* Pusat Kajian Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan *Whole of Government*.
5. Sosialisasi videografis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, akuntabilitas, nasionalisme, *Whole of Government* dan pelayanan publik.
6. Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.

Pembelajaran yang didapat dari kegiatan aktualisasi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS serta mengetahui peran dan kedudukan PNS dalam NKRI adalah mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan, mengedepankan semangat nasionalisme diatas kepentingan pribadi maupun golongan, menerapkan standar etika publik dalam perilaku kerja dan keseharian, senantiasa berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatan, dan tidak melakukan praktik korupsi di lingkungan kerja.

Jika dalam melaksanakan keenam kegiatan di atas tanpa didasari nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan PNS dalam NKRI maka hasil pekerjaan akan kurang optimal sehingga menyebabkan tujuan organisasi juga tidak tercapai secara optimal.

B. Saran

Selama proses pembelajaran klasikal maupun non klasikal dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) CPNS DPR RI termasuk pelaksanaan program aktualisasi ini, maka terdapat beberapa saran dimana penulis berharap melalui kegiatan dan laporan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan sehingga tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS. Videografis merupakan suatu metode penyajian yang sudah banyak dikembangkan di berbagai Kementerian/Lembaga dan hal ini akan sangat baik jika DPR dalam hal ini Pusat Kajian Anggaran juga melakukan terobosan yang sama. Oleh karena itu, dukungan teknis, anggaran dan sumber daya manusia dari Pusat Kajian Anggaran untuk mengembangkan videografis ini merupakan hal yang sangat penting. Dan harapan utamanya agar hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi organisasi.

C. Rencana Tindak Lanjut

Agar kegiatan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan serta tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS maka penulis akan:

1. Berupaya untuk membuat '*mini videografis*' yang sifatnya tidak membahas suatu kajian secara utuh namun sifatnya seperti '*trailer*'.
2. Jika kiranya kegiatan ini dilanjutkan dan didukung sumber daya baik anggaran maupun SDM, maka penulis akan sangat senang untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan olah videografisnya.
3. Membuat videografis terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja.

LAMPIRAN KEGIATAN 1

*Berkoordinasi dengan Kepala Pusat dan BDTI
terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi*

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Vita Puji Lestari, S.E.
 NIP : 19930609 201801 2 002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran
 Gagasan : Optimalisasi Penggunaan Videografis dalam menstimulus atensi pembaca produk kajian di Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 1 : Berkoordinasi dengan Kepala Pusat dan BDTI terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk memakai slot/ruang dalam <i>website</i> ; 3. Melakukan konfirmasi ke BDTI terkait pembuatan slot; 4. Berkoordinasi dengan BDTI dalam rangka membuka akses layanan unggah video di <i>website</i> ; 5. Membuat slot/ruang dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran untuk videografis.	1-2 : TIDAK ADA KENDALA KLU SECARA INFORMAL SUDAH ADA PEMBIKALAN DGN KAIUS 3-5 : TIDAK ADA KENDALA ICRN KAIUS DAN BDTI MEMBERIKAN RESPON YANG Mendukung	30/05/18 JRIW 7-8/05/18 JRIW
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan; 2. Berita Acara pembuatan slot/ruang dalam <i>website</i> ;	OUTPUT CUKUP DENGAN LAPsing DAN DAFTAR HARIR	JRIW
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Etika Publik; 2. Komitmen Mutu; 3. <i>Whole of Government</i> .	KETIGA SUBSTANSI TELAH TERPENUHI DENGAN BAIK	JRIW
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : 1. Mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang andal melalui inovasi; 2. Videografis dapat meningkatkan kualitas dukungan kajian untuk publik khususnya Anggota DPR RI.	VIDEOGRAFI BENTUK INOVASI YANG DAPAT MENINGKATKAN LAYANAN PRA KEPADA USER	JRIW
Penguatan Nilai Organisasi : Komitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus mendorong terwujudnya Pusat Kajian yang profesional.	BENTUK PROFESIONALISME	JRIW



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR: BK/14726 /SETJENDPR RI/PA/05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Vita Puji Lestari, S.E.
NIP : 19930609 201801 2 002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 30 September 2018. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan pembuatan videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran dengan jumlah *output* yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) videografis.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Mei 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : BK/10255/SETJEN DPR RI/PA/06/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja

Jakarta, 07 Juni 2018

Kepada Yth :

1. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2. Kepala Pusat Kajian Anggaran
3. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi beserta jajaran terkait

SETJEN DPR-RI

JAKARTA

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Pusat Kajian Anggaran akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang dilaksanakan pada :

Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran
Waktu : Pukul 15:00:00 s.d. 18:00:00 WIB
Acara : Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : BK/10264/SETJEN DPR RI/PA/06/2018

Menimbang : a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI
b. Untuk memberikan dukungan administratif, maka diperlukan surat tugas.

Dasar : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Dengan ini Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1.	Kadir Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.	195811081983031006	IV	Kepala Badan Keahlian
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	IV	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
3.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997031005	IV	Kepala Pusat Kajian Anggaran
4.	Dra. Rini Koentarti, M.Si.	196110091993032001	IV	Kepala Bagian Tata Usaha Badan Keahlian
5.	Dadang Prayitna, S.IP., M.H.	196708061990031003	IV	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
6.	Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.	196901201998032003	IV	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha
8.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	IV	Pranata Komputer Madya
9.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	IV	Pranata Komputer Madya
10.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
11.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	198001262014022002	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
12.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	III	Pranata Komputer Muda
13.	Rendy Alvaro, S.Sos	198101032005021004	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
14.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	198106012014022002	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
15.	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.	198501032014022001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
16.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	198506072014021001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
17.	Dahiri, S.Si., M.Sc	198703232014021004	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
18.	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.	198706302014022004	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
19.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	198806212014022001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
20.	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
21.	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
22.	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
23.	Memed Sobari	196810091997031003	III	Pengelola Data
24.	Musbiyatun	197011101997032006	III	Pengelola Data
25.	Martin Yohannes	197103131994031004	III	Pengelola Data
26.	Siti Rahmawati, S.E.	198006112003122004	III	Pengelola Data
27.	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	III	Penyusun Bahan Kebijakan
28.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	199103162018012001	III	Penyusun Bahan Kebijakan
29.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	23000020	III	PPNPN
30.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	23000021	III	PPNPN
31.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	23000024	III	PPNPN
32.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	23000025	III	PPNPN
33.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	23000027	III	PPNPN
34.	MUJIBURRAHMAN	23000030	III	PPNPN

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
35.	HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc	23000031	III	PPNPN
36.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE	23000034	III	PPNPN
37.	OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP.,MM	23000035	III	PPNPN
38.	FEBRINA ELIA NABABAN,S.Pd.,M.Sc	23000037	III	PPNPN
39.	MATIUS WINARNO, SE.,MAB	23000039	III	PPNPN
40.	EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak	23000040	III	PPNPN
41.	IRANISA, SE.,M.Acc	23000041	III	PPNPN
42.	DYAH MAYSARAH, S.Hut	23000042	III	PPNPN
43.	NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc	23000043	III	PPNPN
44.	LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM	23000044	III	PPNPN
45.	ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE	23000045	III	PPNPN
46.	RIZA ADITYA SYAFRI, S.Ak	23000046	III	PPNPN
47.	RAHAYUNINGSIH	23000047	III	PPNPN
48.	DEASY DWI RAMIAYU	23000048	III	PPNPN
49.	DESSY MULYANTI HARAHAP	180000087	II	PPNPN
50.	EMPENG SUNADI	190000066	II	PPNPN

Untuk mengikuti Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja PUSAT KAJIAN ANGGARAN Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Kamis, 07 Juni 2018, Pukul 15:00:00 s.d. 18:00:00 WIB dalam rangka Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran.

Demikian Surat Tugas ini di buat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 07 Juni 2018

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005



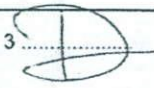


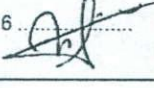
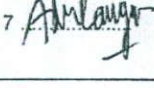

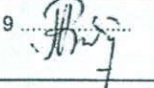
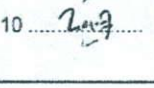


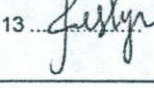
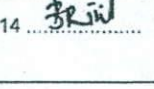
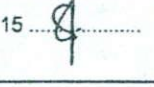
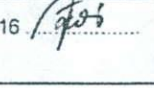

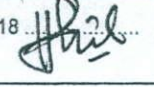
DAFTAR HADIR
RAPAT DALAM KANTOR DILUAR JAM KERJA
Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran




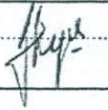
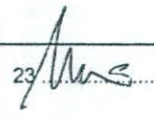
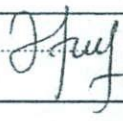
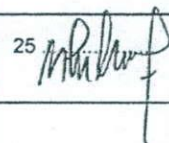
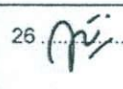
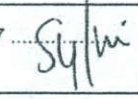












Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018



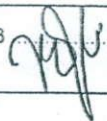
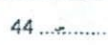




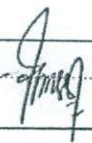

Waktu : 15:00:00 s.d. 18:00:00

Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran

Acara : Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	195902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	
2.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997031005	Kepala Pusat Kajian Anggaran		2 
3.	Dadang Prayitna, S.I.P., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	3	
4.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006	Kepala Subbagian Tata Usaha		
5.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	5	
6.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya		6 
7.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	7	
8.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda		8 
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analisis Kebijakan Pertama	9	
10.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	198001262014022002	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		10 
11.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda	11	
12.	Rendy Alvaro, S.Sos	198101032005021004	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda		12 
13.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	198106012014022002	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	13	
14.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	198203042014021003	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		14 
15.	Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.	198501032014022001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	15	
16.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	198506072014021001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		16 
17.	Dahiri, S.Si., M.Sc	198703232014021004	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	17	
18.	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.	198706302014022004	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		18 

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
19.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	198806212014022001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	19	
20.	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		20 
21.	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	21	
22.	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		22 
23.	Memed Sobari	196810091997031003	Pengelola Data	23	
24.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data		24 
25.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	25	
26.	Siti Rahmawati, S.E.	198006112003122004	Pengelola Data		26 
27.	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	Penyusun Bahan Kebijakan	27	
28.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	199103162018012001	Penyusun Bahan Kebijakan		28 
29.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	23000020	PPNPN	29	
30.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	23000021	PPNPN		30 
31.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	23000024	PPNPN	31	
32.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	23000025	PPNPN		32 
33.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	23000027	PPNPN	33	
34.	MUJIBURRAHMAN	23000030	PPNPN		34 
35.	HIKMATUL FITRI, SE., M.Sc	23000031	PPNPN	35	
36.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE	23000034	PPNPN		36 
37.	OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP., MM	23000035	PPNPN	37	
38.	FEBRINA ELIA NABABAN, S.Pd., M.Sc	23000037	PPNPN		38 
39.	MATIUS WINARNO, SE., MAB	23000039	PPNPN	39	

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	IRANISA, SE.,M.Acc	23000041	PPNPN	41 	
42.	DYAH MAYSARAH, S.Hut	23000042	PPNPN		42 
43.	NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc	23000043	PPNPN	43 	
44.	LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM	23000044	PPNPN		44 
45.	ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE	23000045	PPNPN	45 	
46.	RIZA ADITYA SYAFRI, S.Ak	23000046	PPNPN		46 
47.	RAHAYUNINGSIH	23000047	PPNPN	47 	
48.	DEASY DWI RAMIAYU	23000048	PPNPN		48 
49.	DESSY MULYANTI HARAHAP	180000087	PPNPN	49 	
50.	EMPENG SUNADI	190000066	PPNPN		50 

LAPORAN HASIL RAPAT

Pengundang : PUSAT KAJIAN ANGGARAN

No. Surat Undangan : BK/10255/SETJEN DPR RI/PA/06/2018

Tgl. Surat Undangan : Kamis, 07 Juni 2018

Tgl. RDK : Kamis, 07 Juni 2018

Waktu : 15:00:00 s.d. 18:00:00

Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran

Acara : Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

Peserta : Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pranata Komputer Muda, Analis Kebijakan Pertama, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda, Pranata Komputer Madya, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama, Penyusun Bahan Kebijakan, Pengelola Data, PPNPN

CATATAN / KESIMPULAN

Acara ini berlangsung dengan baik, dengan hasil-hasil dari diskusi yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mendukung terwujudnya koordinasi yang baik antar pegawai analis APBN dan Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran, maka dibutuhkan pengadaan folder sharing. BDTI pun akan memberikan dukungan seperti pembukaan akses pegawai untuk cloud.dpr.go.id.
2. Dalam rangka melakukan update teori APBN dalam menu kamus pada website pusat kajian anggaran, BDTI memberikan akses sebagai admin untuk dapat mengupload file teori tersebut, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Pembuatan videografis dilakukan dengan menambahkan suatu ruang dalam website Pusat Kajian Anggaran. Penambahan ruang untuk keperluan videografis tersebut dilakukan dengan menambahkan satu sub menu "videografis" di bawah sub menu "infografis" sebagai bagian dari menu "produk" pada website Pusat Kajian Anggaran. Agar tidak memberatkan website saat loading, maka sebagai tampilan tidak berbentuk grafik yang dinamis melainkan cover videografis yang akan bergerak jika di klik terlebih dahulu. Selain itu, untuk melakukan pengunggahan videografis, maka akan dibukakan akses admin untuk melakukan unggah videografis setelah mendapat ijin prinsip dari Kepala Pusat Kajian Anggaran. Besaran videografis maksimal yang dapat diunggah adalah sebesar 128MB.
4. Semua file yang akan diupload ke Website Pusat Kajian Anggaran harus mendapatkan persetujuan oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran.

Jakarta, 07 Juni 2018

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

NIP. 197109111997031005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : BK/10265/SETJEN DPR RI/PA/06/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja

Jakarta, 08 Juni 2018

Kepada Yth :

1. Kepala Badan Keahlian
2. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
3. Kepala Pusat Kajian Anggaran
4. Kepala Bagian Tata Usaha Badan Keahlian beserta jajaran terkait
5. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi beserta jajaran terkait

SETJEN DPR-RI

JAKARTA

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Pusat Kajian Anggaran akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang dilaksanakan pada :

Tanggal : Jumat, 08 Juni 2018
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran
Waktu : Pukul 15:30:00 s.d. 18:30:00 WIB
Acara : Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

NIP. 197109111997031005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : BK/10226/SETJEN DPR RI/PA/06/2018

Menimbang : a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI
b. Untuk memberikan dukungan administratif, maka diperlukan surat tugas.

Dasar : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018

Dengan ini Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	IV	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997031005	IV	Kepala Pusat Kajian Anggaran
3.	Dadang Prayitna, S.IP., M.H.	196708061990031003	IV	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
4.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha
5.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	III	Kepala Subbagian Tata Usaha
6.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	IV	Pranata Komputer Madya
7.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	IV	Pranata Komputer Madya
8.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	III	Analisis Kebijakan Pertama
10.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	198001262014022002	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
11.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	III	Pranata Komputer Muda
12.	Rendy Alvaro, S.Sos	198101032005021004	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
13.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	198106012014022002	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
14.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	198203042014021003	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
15.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	198203042014021003	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
16.	Marihot Nasution, S.E., M.Si.	198410092014022001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
17.	Martha Carolina, SE., Ak., M. Ak.	198501032014022001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
18.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	198506072014021001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
19.	Dahiri, S.Si., M.Sc	198703232014021004	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
20.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	198806212014022001	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
21.	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
22.	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
23.	Sekar Aditya Dwikiran	199405012018012002	III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
24.	Memed Sobari	196810091997031003	III	Pengelola Data
25.	Budi Rachmat	197010021998031003	III	Pengelola Data Pencairan Dana
26.	Musbiyatun	197011101997032006	III	Pengelola Data
27.	Martin Yohannes	197103131994031004	III	Pengelola Data
28.	Siti Rahmawati, S.E.	198006112003122004	III	Pengelola Data
29.	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	III	Penyusun Bahan Kebijakan
30.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	199103162018012001	III	Penyusun Bahan Kebijakan
31.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	23000020	III	PPNPN
32.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	23000021	III	PPNPN
33.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	23000024	III	PPNPN

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
34.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	23000025	III	PPNPN
35.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	23000027	III	PPNPN
36.	MUJIBURRAHMAN	23000030	III	PPNPN
37.	HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc	23000031	III	PPNPN
38.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE	23000034	III	PPNPN
39.	OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP.,MM	23000035	III	PPNPN
40.	FEBRINA ELIA NABABAN,S.Pd.,M.Sc	23000037	III	PPNPN
41.	MATIUS WINARNO, SE.,MAB	23000039	III	PPNPN
42.	EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak	23000040	III	PPNPN
43.	IRANISA, SE.,M.Acc	23000041	III	PPNPN
44.	NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc	23000043	III	PPNPN
45.	LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM	23000044	III	PPNPN
46.	ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE	23000045	III	PPNPN
47.	RIZA ADITYA SYAFRI, S.Ak	23000046	III	PPNPN
48.	RAHAYUNINGSIH	23000047	III	PPNPN
49.	DEASY DWI RAMIAYU	23000048	III	PPNPN
50.	DESSY MULYANTI HARAHAP	180000087	II	PPNPN

Untuk mengikuti Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja PUSAT KAJIAN ANGGARAN Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Jumat, 08 Juni 2018, Pukul 15:30:00 s.d. 18:30:00 WIB dalam rangka Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran.

Demikian Surat Tugas ini di buat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 08 Juni 2018

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

NIP. 197109111997031005




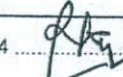

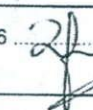
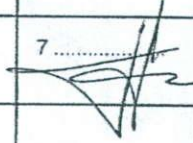




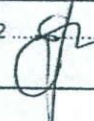
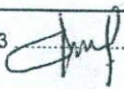
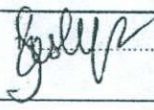

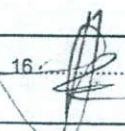


RAPAT DALAM KANTOR DILUAR JAM KERJA
Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

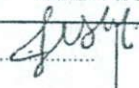


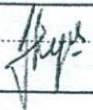

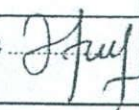
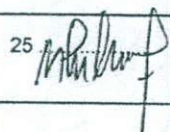
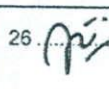
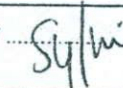

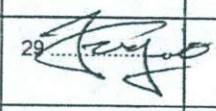




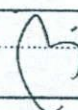
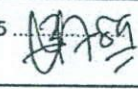
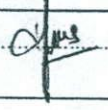


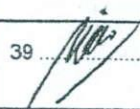
Tanggal : Jumat, 08 Juni 2018



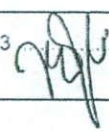





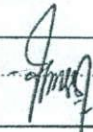

Waktu : 15:30:00 s.d. 18:30:00

Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran

Acara : Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Kadir Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.	195811081983031006	Kepala Badan Keahlian	1. 	
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		2. 
3.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997031005	Kepala Pusat Kajian Anggaran	3. 	
4.	Dra. Rini Koentarti, M.Si.	196110091993032001	Kepala Bagian Tata Usaha Badan Keahlian		4. 
5.	Dadang Prayitna, S.IP., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	5. 	
6.	Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.	196901201998032003	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		6. 
7.	Mardi Harjo, S.E., M.Si.	197009151998031006	Kepala Subbagian Tata Usaha	7. 	
8.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya		8. 
9.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	9. 	
10.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda		10. 
11.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	198001262014022002	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	11. 	
12.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		12. 
13.	Rendy Alvaro, S.Sos	198101032005021004	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	13. 	
14.	Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.	198106012014022002	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		14. 
15.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	198203042014021003	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	15. 	
16.	Marihot Nasution, S.E., M.Si.	198410092014022001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		16. 
17.	Martha Carolina, SE., Ak., M. Ak.	198501032014022001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	17. 	
18.	Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M	198506072014021001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama		18. 

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
19.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.	198806212014022001	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	19	
20.	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	20	
21.	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	21	
22.	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	22	
23.	Memed Sobari	196810091997031003	Pengelola Data	23	
24.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	24	
25.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	25	
26.	Siti Rahmawati, S.E.	198006112003122004	Pengelola Data	26	
27.	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	Penyusun Bahan Kebijakan	27	
28.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	199103162018012001	Penyusun Bahan Kebijakan	28	
29.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	23000020	PPNPN	29	
30.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	23000021	PPNPN	30	
31.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	23000024	PPNPN	31	
32.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	23000025	PPNPN	32	
33.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	23000027	PPNPN	33	
34.	MUJIBURRAHMAN	23000030	PPNPN	34	
35.	HIKMATUL FITRI, SE., M.Sc	23000031	PPNPN	35	
36.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE	23000034	PPNPN	36	
37.	OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP., MM	23000035	PPNPN	37	
38.	FEBRINA ELIA NABABAN, S.Pd., M.Sc	23000037	PPNPN	38	
39.	MATIUS WINARNO, SE., MAB	23000039	PPNPN	39	

NO.	NAMA	NIK	KELOMPOK	TANDA TANGAN	
41.	IRANISA, SE.,M.Acc	23000041	PPNPN	41 	
42.	DYAH MAYSARAH, S.Hut	23000042	PPNPN		42 
43.	NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc	23000043	PPNPN	43 	
44.	LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM	23000044	PPNPN		44 
45.	ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE	23000045	PPNPN	45 	
46.	RIZA ADITYA SYAFRI, S.Ak	23000046	PPNPN		46 
47.	RAHAYUNINGSIH	23000047	PPNPN	47 	
48.	DEASY DWI RAMIAYU	23000048	PPNPN		48 
49.	DESSY MULYANTI HARAHAP	180000087	PPNPN	49 	
50.	EMPENG SUNADI	190000066	PPNPN		50 

LAPORAN HASIL RAPAT

Pengundang : PUSAT KAJIAN ANGGARAN

No. Surat Undangan : BK/10265/SETJEN DPR RI/PA/06/2018

Tgl. Surat Undangan : Jumat, 08 Juni 2018

Tgl. RDK : Jumat, 08 Juni 2018

Waktu : 15:30:00 s.d. 18:30:00

Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran

Acara : Pengembangan Information Teknologi (IT) di Pusat Kajian Anggaran

Peserta : Kepala Badan Keahlian, Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Kepala Bagian Tata Usaha Badan Keahlian, Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Pranata Komputer Muda, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda, Pranata Komputer Madya, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama, Pengelola Data Pencairan Dana, Pengelola Data, Penyusun Bahan Kebijakan, PPNPN

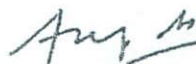
CATATAN / KESIMPULAN

Acara ini berlangsung dengan baik, dengan hasil-hasil dari diskusi yaitu sebagai berikut :

1. Pelatihan dilakukan oleh BDTI terkait kelanjutan cloud.dpr.go.id sehingga folder sharing dapat terwujud di Pusat Kajian Anggaran. Akses cloud.dpr.go.id hanya bisa dimasuki oleh PNS di lingkungan Pusat Kajian Anggaran dengan username yang sama dengan portal dpr.go.id. Namun, Pegawai Tidak Tetap di DPR RI bisa juga mengakses cloud tersebut dengan memperoleh tautan/link yang diberikan pembuat folder sharing tersebut.
2. Penambahan sub menu data indikator ekonomi berupa tampilan grafik pada menu produk di website Pusat Kajian Anggaran. Data indikator kesejahteraan masyarakat akan diolah dengan Microsoft Excel dan disajikan dalam bentuk grafik. Grafik tersebut akan discreenshoot dan dimasukkan dalam website dalam format JPG. Serta dibuat deskripsi mengenai data tersebut.
3. Pembuatan dan Ujicoba proses unggah videografis pada website pusaka anggaran dan konsultasi dengan bdti terkait penambahan fungsi untuk mendukung kelancaran pengunggahan videografis.
4. BDTI memberikan pelatihan terkait teknis / cara mengupload file deskripsi peristiwa pada menu knowledge management di website Pusat Kajian Anggaran.

Jakarta, 08 Juni 2018

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NO. BK/10288/SETJEN DAN BK-DPR RI/PA/06/2018

Kepada : Yth. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
Dari : Kepala Pusat Kajian Anggaran
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Website Pusat Kajian Anggaran
Tanggal : 7 Juni 2018

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, permohonan untuk pembukaan akses website Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI atas nama:

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL
1	Hilda Piska Randini, SIP	199103162018012001	Staf TU	III
2	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	Staf TU	III
3	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	Analisis APBN	III
4	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	Analisis APBN	III
5	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	Analisis APBN	III

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197009151998031006

Andang . 8/6-18.

DOKUMENTASI: Konfirmasi dan berkoordinasi dengan BDTI dalam rangka membuka akses layanan unggah video di *website*



Rapat dengan BDTI pada Kamis, 7 Juni 2018



Rapat dengan BDTI pada Jumat, 8 Juni 2018

LAMPIRAN KEGIATAN 2

Merancang konsep dan tampilan videografis

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Vita Puji Lestari, S.E.
 NIP : 19930609 201801 2 002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran
 Gagasan : Optimalisasi Penggunaan Videografis dalam menstimulus atensi pembaca produk kajian di Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 2 : Merancang konsep dan tampilan videografis

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Melakukan kajian terhadap produk kajian PKA; 3. Menyusun konsep terkait substansi videografis; 4. Menyusun konsep terkait tampilan videografis; 5. Meminta masukan mentor atas konsep videografis.	USULAN KONSEP SUDAH BAIK DAN DAPAT DILANJUTKAN PADA TAHAPAN SELANJUTNYA	8/06/18 3RiW
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen uraian konsep videografis; 2. Dokumen masukan dari mentor terkait konsep videografis.	TERPENUHI	3RiW
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Etika Publik; 2. Komitmen Mutu; 3. Akuntabilitas; 4. Anti Korupsi.	KEEMPAT SUBSTANSI ITU TELAH TERPENUHI	3RiW
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : Konsep yang baik diharapkan dapat menstimulasi minat baca terhadap hasil kajian organisasi sehingga misi organisasi untuk mendukung fungsi anggaran Dewan akan menjadi lebih efektif.	KONSEP YANG DISUSUN SUDAH OK DAN DAPAT MENUNDAK TUSI ORGANISASI	3RiW
Penguatan Nilai Organisasi : Kegiatan perancangan konsep dan tampilan dari videografis merupakan upaya pengembangan kemampuan dan kompetensi dari SDM Pusat Kajian Anggaran dimana nilai ini sangat mendukung perwujudan nilai profesionalisme organisasi.	BENTUK PROFESIONALISME	3RiW

SLIDE I

□ judul

□ Ada unsur yg menunjukkan nelayan / laut

JUDUL:

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia melalui Percepatan Pembangunan Sektor Perikanan.

PERKIRAAN WAKTU: 10"

SLIDE II

□ icon pembangunan

□ icon yg menggambarkan pengentasan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan masyarakat

NARASI:

Idealnya, perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang mampu mendorong perkembangan kegiatan/sektor-sektor yang berdampak besar terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang harus dikembangkan adalah sektor perikanan.

PERKIRAAN WAKTU: 20"

SLIDE III

□ peta Indonesia + data

□ icon / infografis + pemaparan data

□ icon sektor perikanan

□ masih berpenghasilan rendah (icon)

JUDUL:

KILAS PERKEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN INDONESIA

NARASI:

Indonesia, adalah Negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 104,000 km. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 2,5 juta Rumah Tangga atau 9,7 juta jiwa penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, dimana mereka umumnya berada di pedesaan dan didominasi masyarakat berpenghasilan rendah.

PERKIRAAN WAKTU: 30"

SLIDE IV

- icon yg menjelaskan kondisi / sebab perlambatan pertumbuhan.
- ilustrasi yg menggambarkan perbandingan. bahwa peningkatan produksi perikanan tidak selaras dgn benefit yg diterima daerah-daerah sentra perikanan yang justru tingkat kemiskinannya tinggi.

SLIDE V

- Penjelasan apa itu NTN.
- Perbandingan angka produksi dgn nilai NTN.
- icon pemilik kapal & pemilik modal.

SLIDE VI

- icon pembuka "masalah"
- 1. icon kesulitan akses modal
- 2. icon overfishing.

JUDUL:

Selama kurun 2010-2017, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2015 terjadi perlambatan pertumbuhan akibat adanya kebijakan pelarangan penggunaan cantrang serta kondisi overfishing di beberapa wilayah.

Peningkatan tersebut, harusnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun realitanya, provinsi penghasil perikanan terbesar seperti Nusa Tenggara, Maluku dan beberapa daerah lainnya masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

PERKIRAAN WAKTU: 40"

NARASI:

Kesejahteraan nelayan diukur dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Faktanya, peningkatan produksi perikanan belum selaras dengan perkembangan Nilai Tukar Nelayan yang justru mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan jika nelayan bukanlah pihak yang diuntungkan atas kenaikan tersebut.

Hasil wawancara im PKA, menemukan bahwa pihak yang lebih besar mendapat keuntungan dalam rantai ekonomi sektor perikanan adalah pemilik kapal/pemilik modal atau yang biasa kita sebut "middle man"

PERKIRAAN WAKTU: 40"

NARASI:

Untuk mengoptimalkan nilai tambah atas peningkatan kinerja sektor perikanan, maka menjadi sangat penting untuk memahami apa saja permasalahan krusial yang dihadapi sektor perikanan khususnya nelayan. Diantaranya:

Pertama, keterbatasan kemampuan dan akses permodalan menyebabkan rendahnya produktivitas nelayan.

Kedua, kondisi overfishing di beberapa wilayah Indonesia yang apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menyebabkan krisis sektor perikanan nasional dimasa mendatang.

SLIDE VI

- 3. Icon impor mahal
- 4. Icon nelayan terpuruk
- 5. Icon kapasitas SDM rendah
- 6. Icon teknologi kurang
- 7. Icon hukum

Ketiga, adanya ketergantungan yang tinggi se mahalnya impor bahan input budidaya ikan ;

Keempat, fakta bahwa nelayan kecil dan buruh nelay bukanlah pihak yang paling diuntungkan at mekanisme pasar selama ini;

Kelima, rendahnya kapasitas SDM nelayan lini dengan rendahnya kompetensi yang dimiliki nelayan;

Keenam, masih terbatasnya pemanfaatan teknolo yang digunakan, serta;

Ketujuh, Adanya beberapa regulasi yang dinilai dap menghambat nelayan.

PERKIRAAN WAKTU: 60"

SLIDE VII

- Icon pembukaan

- 1. Icon kredit

- 2. Icon Pinjaman Dana Bergulir

- 3. Icon subsidi solar

JUDUL:

EVALUASI DUKUNGAN ANGGARAN MELALUI BELANJ PEMERINTAH PUSAT

NARASI:

Pertama, masih rendahnya proporsi Kredit Usah Rakyat yang disalurkan oleh Lembaga Jasa Keuangan/Perbankan ke sektor perikanan;

Kedua, Pembiayaan melalui pinjaman dana bergulir masih belum optimal sentuh sektor perikanan;

Ketiga, kebijakan subsidi solar belum optimal bantu nelayan kecil;

Keempat, asuransi nelayan bermanfaat namun belum berjalan optimal;

Kelima, Program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu masih menemui kendala dan belum optimal;

Keenam, Bantuan kapal dan alat tangkap belum optimal mengakomodasi kebutuhan dan keragaman kondisi geografis pesisir.

PERKIRAAN WAKTU: 60"

SLIDE VII

Dalam mendorong kinerja & menyelesaikan permasalahan tersebut, berbagai regulasi & kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya kebijakan dukungan anggaran melalui Belanja Pemas di APBN. Namun upaya tersebut masih belum optimal, diantaranya:

- 4. Asuransi
- 5. Icon Program SKPT.
- 6. Icon Bantuan Kapal.

SLIDE VIII

□ 100 Rekomendasi

□

diberikan pembataan /
bagging sebelum masuk
Rekomendasi

DURASI MAKSIMUM 5 MENIT

rangkat dan permasalahan yang belum optimalnya dukungan pemerintah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mendorong akselerasi pembangunan sektor perikanan, yakni

REKOMENDASI:

Pertama, perlunya mendorong dan menguatkan koperasi nelayan;

Kedua, perlunya meningkatkan peran teknologi sesuai dengan kondisi sosial budaya pada setiap daerah;

Ketiga, perlunya penguatan kapasitas SDM nelayan;

Keempat, perlunya pembentukan badan logistik perikanan;

Kelima, perlunya rivi dan perbaikan aturan perundang-undangan yang memberatkan nelayan kecil;

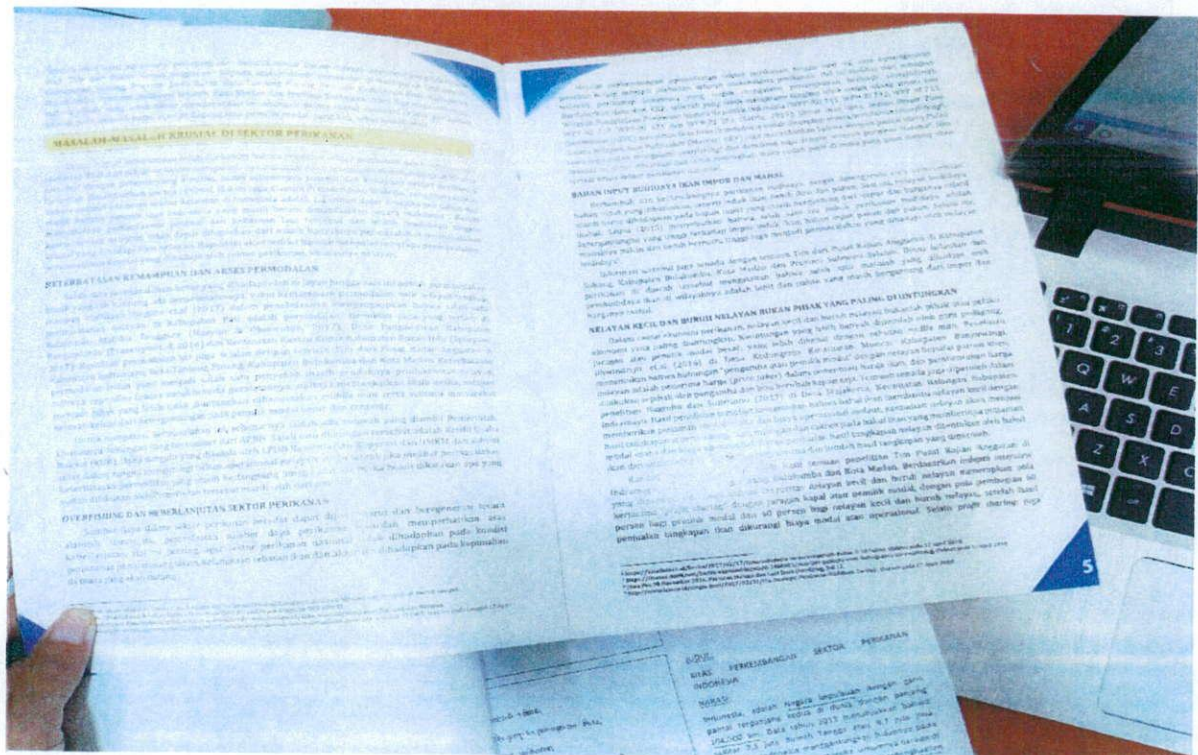
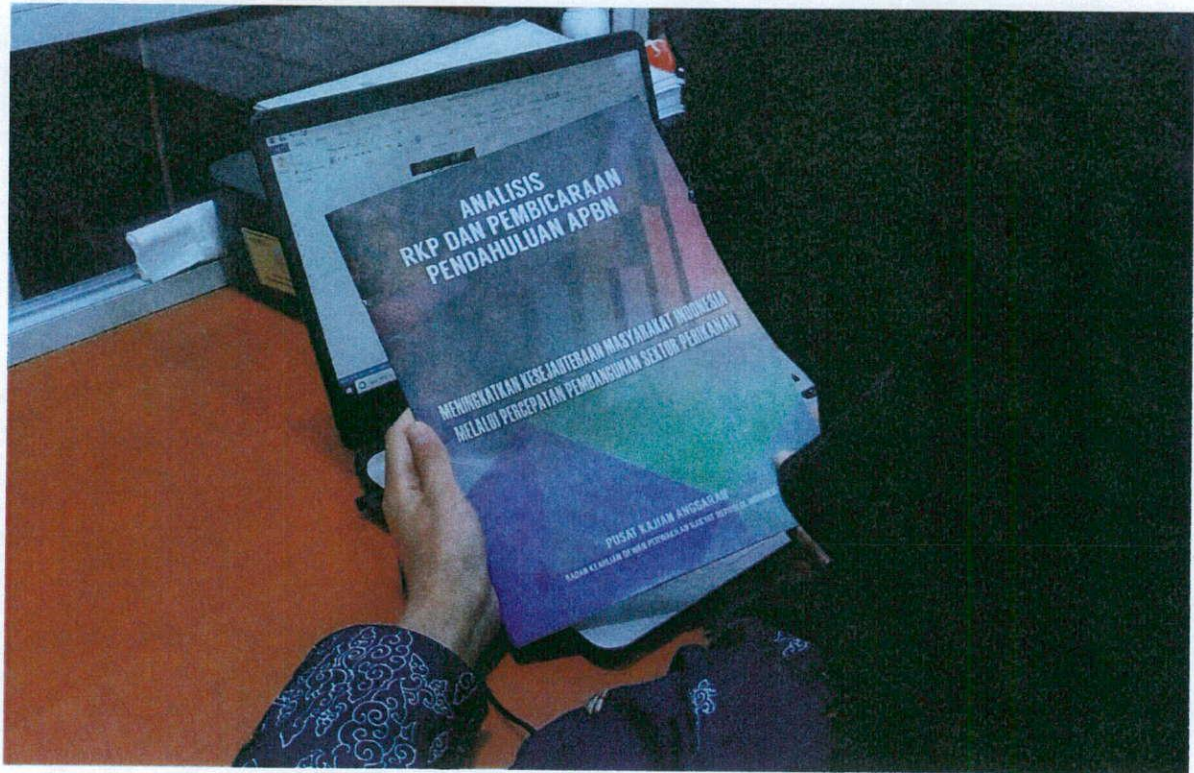
Keenam, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terhadap program yang pendanaannya berasal dari APBN;

Ketujuh, perlunya mendorong pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi

PERKIRAAN WAKTU: 40"

- Analisis NTB
- Pemas di NTN
- Swaz Part 8 kesedean

DOKUMENTASI: Melakukan kajian terhadap produk kajian yang akan disajikan dalam bentuk videografis.



LAMPIRAN KEGIATAN 3

*Membuat videografis atas produk kajian di Pusat
Kajian Anggaran*

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Vita Puji Lestari, S.E.
 NIP : 19930609 201801 2 002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran
 Gagasan : Optimalisasi Penggunaan Videografis dalam menstimulus atensi pembaca produk kajian di Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 3 : Membuat videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Menerapkan konsep terkait substansi dan tampilan ke dalam pembuatan videografis; 2. Membuat videografis; 3. Berkoordinasi dengan mentor untuk mendapat masukan terkait videografis; 4. Melakukan perbaikan videografis jika ada perbaikan.	UNTUK PART "EVALUASI ANGGARAN" DITAMBAHKAN PROLOG/BRIDGEL BAGIAN SEBELUMNYA. DEMIKAN JUGA OGAN PART "REKOMENDASI" PROSES KOORDINASI PEMBUATAN VIDEO BERTAHAP & BERJALAN BAIK	15/8/18 3 Riul 16/8/18 3 Riul
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Softfile videografis (sekurang-sekurangnya 1 buah); 2. Dokumen masukan dari mentor terkait videografis yang dibuat.	TARGET MINIMAL SUDAH TEREALISASI DAN MASUKAN MENTOR SUDAH DIACOMODAK	3 Riul
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Etika Publik; 2. Komitmen Mutu; 3. Akuntabilitas; 4. Anti Korupsi.	KEEMPAT SUBSTANSI MAJ TELPENJRI SELAMA PROSES	3 Riul
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : Pembuatan videografis merupakan upaya menemukan alternatif media untuk meningkatkan pemanfaatan produk kajian PKA oleh Anggota Dewan, memperkuat manajemen pengetahuan, dan memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.	HASIL VIDEOGRAFI SUDAH AKAN MENGUATKAN TUSI ORGANISASI (INOVASI LAYANAN)	3 Riul
Penguatan Nilai Organisasi : Kegiatan pembuatan videografis merupakan upaya pengembangan kemampuan dan kompetensi dari SDM Pusat Kajian Anggaran dimana nilai ini sangat mendukung perwujudan nilai profesionalisme organisasi.	BENTUK PROFESIONALISME	3 Riul

CATATAN : LANJUTKAN PERMOHONAN UNGGAH KE WEB PKA SKI DAN SOSIALISASI HASIL KEPADA STAF / ANALIS DI PILA BKD

SLIDE I

JUDUL:

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia melalui Percepatan Pembangunan Sektor Perikanan.

PERKIRAAN WAKTU: 10"

SLIDE II

NARASI:

Idealnya, perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang mampu mendorong perkembangan kegiatan/sektor-sektor yang berdampak besar terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang harus dikembangkan adalah sektor perikanan.

PERKIRAAN WAKTU: 20"

SLIDE III

JUDUL:

KILAS PERKEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN INDONESIA

NARASI:

Indonesia, adalah Negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 104,000 km. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 2,5 juta Rumah Tangga atau 9,7 juta jiwa penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, dimana mereka umumnya berada di pedesaan dan didominasi masyarakat berpenghasilan rendah.

PERKIRAAN WAKTU: 30"

SLIDE IV

JUDUL:

Selama kurun 2010-2017, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2015 terjadi perlambatan pertumbuhan akibat adanya kebijakan pelarangan penggunaan cantrang serta kondisi overfishing di beberapa wilayah

Peningkatan tersebut, harusnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun realitanya, provinsi penghasil perikanan terbesar seperti Nusa Tenggara, Maluku dan beberapa daerah lainnya masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

PERKIRAAN WAKTU: 40"

SLIDE V

NARASI:

Kesejahteraan nelayan diukur dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Faktanya, peningkatan produksi perikanan belum selaras dengan perkembangan Nilai Tukar Nelayan yang justru mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan jika nelayan bukanlah pihak yang diuntungkan atas kenaikan tersebut.

Hasil wawancara im PKA, menemukan bahwa pihak yang lebih besar mendapat keuntungan dalam rantai ekonomi sektor perikanan adalah pemilik kapal/pemilik modal atau yang biasa kita sebut "middle man"

PERKIRAAN WAKTU: 40"

SLIDE VI

NARASI:

Untuk mengoptimalkan nilai tambah atas peningkatan kinerja sektor perikanan, maka menjadi sangat penting untuk memahami apa saja permasalahan krusial yang dihadapi sektor perikanan khususnya nelayan. Diantaranya:

Pertama, keterbatasan kemampuan dan akses permodalan menyebabkan rendahnya produktivitas nelayan.

Kedua, kondisi overfishing di beberapa wilayah Indonesia yang apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menyebabkan krisis sektor perikanan nasional dimasa mendatang.

SLIDE VI

Ketiga, adanya ketergantungan yang tinggi serta mahalnya impor bahan input budidaya ikan ;

Keempat, fakta bahwa nelayan kecil dan buruh nelayan bukanlah pihak yang paling diuntungkan atau mekanisme pasar selama ini;

Kelima, rendahnya kapasitas SDM nelayan linie dengan rendahnya kompetensi yang dimiliki nelayan;

Keenam, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi yang digunakan, serta;

Ketujuh, Adanya beberapa regulasi yang dinilai dapat menghambat nelayan.

PERKIRAAN WAKTU:60"

SLIDE VII

Diberikan pembuktian /
bridging ; agar tidak
membingungkan .

JUDUL:

EVALUASI DUKUNGAN ANGGARAN MELALUI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

NARASI:

Pertama, masih rendahnya proporsi Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh Lembaga Jasa Keuangan/Perbankan ke sektor perikanan;

Kedua, Pembiayaan melalui pinjaman dana bergulir masih belum optimal sentuh sektor perikanan;

Ketiga, kebijakan subsidi solar belum optimal bantu nelayan kecil;

Keempat, asuransi nelayan bermanfaat namun belum berjalan optimal;

Kelima, Program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu masih menemui kendala dan belum optimal;

Keenam, Bantuan kapal dan alat tangkap belum optimal mengakomodasi kebutuhan dan keragaman kondisi geografis pesisir.

PERKIRAAN WAKTU:60"

SLIDE VII

Dalam mendorong kinerja & menyelesaikan permasalahan tersebut, berbagai regulasi & kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya kebijakan dukungan anggaran melalui Belanja Pempu di APBN. Namun upaya tersebut masih belum optimal, diantaranya:

diberikan pembataan /
bimbingan sebelum masuk
Rekomendasi .

DURASI MAKSIMUM 5 MENIT

angkat dr permasalahan yg belum optimalnya dukungan
pintah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
beberapa hal yg spt dilakukan pemerintah guna
dorong akselerasi pembangunan sektor perikanan, yakni

REKOMENDASI:

Pertama, perlunya mendorong dan menguatkan
koperasi nelayan;

Kedua, perlunya meningkatkan peran teknologi sesuai
dengan kondisi sosial budaya pada setiap daerah;

Ketiga, perlunya penguatan kapasitas SDM nelayan;

Keempat, perlunya pembentukan badan logistik
perikanan;

Kelima, perlunya rivi dan perbaikan aturan
perundang-undangan yang memberatkan nelayan
kecil;

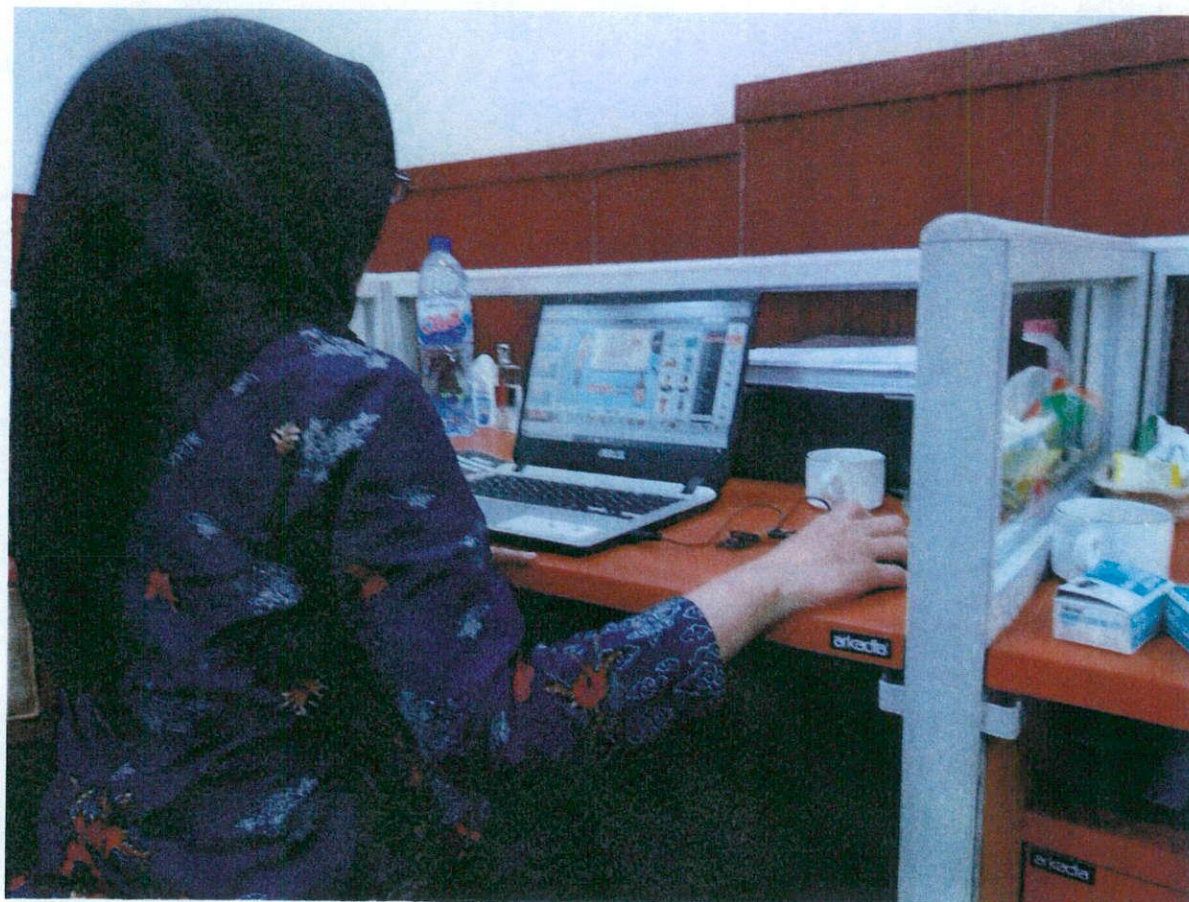
Keenam, perlu adanya evaluasi dan perbaikan
terhadap program yang pendanaannya berasal dari
APBN;

Ketujuh, perlunya mendorong pemanfaatan dana desa
untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui
koperasi

PERKIRAAN WAKTU: 40"

- Analisis NTB
- Pemas di NTU
- Swas Part 8 kesediaan .

DOKUMENTASI: Kegiatan pembuatan videografis



LAMPIRAN KEGIATAN 4

*Mengunggah videografis ke website Pusat Kajian
Anggaran*

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Vita Puji Lestari, S.E.
 NIP : 19930609 201801 2 002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran
 Gagasan : Optimalisasi Penggunaan Videografis dalam menstimulus atensi pembaca produk kajian di Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 4 : Mengunggah videografis ke website Pusat Kajian Anggaran

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Berkoordinasi dengan Pegawai yang berwenang untuk mengelola website Pusat Kajian Anggaran; 3. Mengunggah videografis ke website Pusat Kajian Anggaran	SEBELUM UPLOAD KE WEB SUDAH MEMENDAPATKAN IZIN PRINSIP DARI KARPUS PKA - BKO	31/8/18 [Paraf]
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Berita Acara pengunggahan videografis ke website Pusat Kajian Anggaran oleh BDTI/pihak yang berwenang;	SUDAH DIBUATKAN	[Paraf]
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Etika Publik; 2. Whole of Government.	KEDUA SUBSTANSI MP TERPENUHI	[Paraf]
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : Pengunggahan videografis merupakan upaya menemukan alternatif media untuk meningkatkan pemanfaatan produk kajian PKA oleh Anggota Dewan, memperkuat manajemen pengetahuan, dan memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.	MENGUATIKAN LAYANAN PKA BKO KEPADA ANGGOTA DPR RI DAN USER LAIN	[Paraf]
Penguatan Nilai Organisasi : Kegiatan pengunggahan videografis merupakan upaya pengembangan kemampuan dan kompetensi dari SDM Pusat Kajian Anggaran dimana nilai ini sangat mendukung perwujudan nilai profesionalisme organisasi.	BENTUK PROFESIONALIS ME	[Paraf]



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

NOMOR: BK /14904 / SETJEN DAN BK- DPR RI /PA/08/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Vita Puji Lestari, S.E.
NIP : 19930609 201801 2 002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi berupa pembuatan videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran mulai tanggal 28 Mei 2018 – 30 September 2018. Adapun dalam rangkaian kegiatan aktualisasi tersebut, diantaranya terdapat kegiatan pengunggahan videografis ke *website* Pusat Kajian Anggaran serta kegiatan sosialisasi videografis.

Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 Agustus 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005



BERITA ACARA

NOMOR: BK/14724/SETJEN DAN BK-DPR RI/PA/08/2018

Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, kami masing-masing:

1. Nama : Vita Puji Lestari, S.E.
NIP : 19930609 201801 2 002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

2. Nama : Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
NIP : 198203042014021003
Jabatan : Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah melaksanakan pengunggahan videografis terkait produk kajian di Pusat Kajian Anggaran pada *website* Pusat Kajian Anggaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pihak Kedua,

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
NIP. 19820304 201402 1 003

Jakarta, 28 Agustus 2018
Pihak Pertama,

Vita Puji Lestari, S.E.
NIP. 19930609 201801 2 002

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NO. BK/10288/SETJEN DAN BK-DPR RI/PA/06/2018

Kepada : Yth. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
Dari : Kepala Pusat Kajian Anggaran
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Website Pusat Kajian Anggaran
Tanggal : 7 Juni 2018

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, permohonan untuk pembukaan akses website Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI atas nama:

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOL
1	Hilda Piska Randini, SIP	199103162018012001	Staf TU	III
2	Sylvia Febrina, S.I.A.	199101032018012001	Staf TU	III
3	Sekar Aditya Dwikirana	199405012018012002	Analisis APBN	III
4	Faqih Nur Huda, S.E.	199111162018011003	Analisis APBN	III
5	Vita Puji Lestari, S.E.	199306092018012002	Analisis APBN	III

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197009151998031006

Asep . 8/6 - 18.

[illegible]



BULETIN APBN

Jurnal Resmi Pemerintah RI

No. 16, Vol. 3, Agustus 2018

Menimbang Kembali Kebijakan Tax Refund Wisatawan Mancanegara (Wisman)

p. 01

Ambisiuskah Target Tax Ratio 2019?

p. 9



BULETIN APBN

Jurnal Resmi Pemerintah RI

No. 15, Vol. 3, Agustus 2018

Edisi 16, Agustus 2018, Volume III

- ✦ Mampukah Rp401.220 Memotret Kemiskinan di Indonesia?
- ✦ Revitalisasi Pasar Rakyat: Upaya Menggerakkan Perekonomian Rakyat



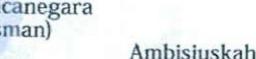
BULETIN APBN

Jurnal Resmi Pemerintah RI

No. 14, Vol. 3, Agustus 2018

Edisi 15, Agustus 2018, Volume III

- ✦ Pentingnya Perkembangan Financial Technology dalam Mendorong Keuangan Inklusif
- ✦ Sudah Tapiukah Penurunan Tarif Pajak UMKM 0,5 persen?



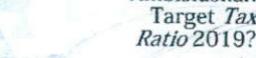
BULETIN APBN

Jurnal Resmi Pemerintah RI

No. 13, Vol. 3, Juli 2018

Edisi 14, Agustus 2018, Volume III

- ✦ Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan
- ✦ Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)



BULETIN APBN

Jurnal Resmi Pemerintah RI

No. 12, Vol. 3, Juli 2018

Edisi 13, Juli 2018, Volume III

- ✦ Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Parang Dagang Amerika vs China
- ✦ Program Indonesia Pintar: Efektivitas dan Format Ideal Kedepannya



BULETIN APBN

Jurnal Resmi Pemerintah RI

No. 11, Vol. 3, Juni 2018

Edisi 12, Juli 2018, Volume III

- ✦ Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Parang Dagang Amerika vs China
- ✦ Program Indonesia Pintar: Efektivitas dan Format Ideal Kedepannya



BULETIN APBN

Jurnal Resmi Pemerintah RI

No. 10, Vol. 3, Juni 2018

Edisi 11, Juni 2018, Volume III

- ✦ Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Parang Dagang Amerika vs China
- ✦ Program Indonesia Pintar: Efektivitas dan Format Ideal Kedepannya

The figure is a composite image. At the top, a video frame shows a ship at sea with the text "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia melalui Percepatan Pembangunan Sektor Perikanan" (Improving the Welfare of the Indonesian Community through Acceleration of Development in the Fisheries Sector). Below this is a blue bar with the text "DATA INDIKATOR". At the bottom, two line graphs are shown. The left graph is titled "Tahun 2012 - 2013" and shows the "Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia" (Consumer Price Index of Indonesia) from January to December. The right graph shows the "Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia" from January to December for the years 2012 and 2013.

LAMPIRAN KEGIATAN 5

*Sosialisasi videografis kepada pihak internal Pusat
Kajian Anggaran*

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Vita Puji Lestari, S.E.
 NIP : 19930609 201801 2 002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran
 Gagasan : Optimalisasi Penggunaan Videografis dalam menstimulus atensi pembaca produk kajian di Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 5 : Sosialisasi videografis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Berkoordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan; 2. Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk mengadakan sosialisasi internal terkait videografis; 3. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk persiapan pelaksanaan sosialisasi; 4. Melakukan sosialisasi internal.	SEMUA TAHAPAN SUDAH DIDALAMAN DAN HASIL KERJA TELAH DISOSIALISA SIKAN KEPADA STAF DAN ANALIS APBN DI PLABED	31/8/18 3Rid
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi; 2. Bahan presentasi sosialisasi; 3. Daftar hadir peserta sosialisasi; 4. Surat undangan sosialisasi	SUDAH DISIAPAN	3Rid
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Etika Publik; 2. Whole of Government; 3. Pelayanan Publik.	KETIGA SUBSTANSI MA TELAH TERPENUHI	3Rid
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : Sosialisasi terkait keberadaan videografis dalam lingkup internal diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk berinovasi dan mediaberbagi pengetahuan dan diharapkan akan berdampak pada terciptanya profesionalitas organisasi melalui pembangunan profesionalisme pegawainya.	MENJADI PEMANTIK BAC TEMAN SEJAWAT (ANALIS APBN) UNTUK MELAKUKAN HAL YG SAMA DAN BERMAN FAAT BAGI ORGANISASI	3Rid
Penguatan Nilai Organisasi : Dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, artinya organisasi telah melakukan suatu proses "sharing information" di dalamnya. Dengan adanya proses transfer pengetahuan yang baik dalam organisasi, akan mendorong kompetensi dan semangat inovasi tiap-tiap individu dalam organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya organisasi yang profesional.	BERTUK PROFESIONALISME	3Rid



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR: BK /14904 / SETJEN DAN BK-DPRRI /PA/08/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Vita Puji Lestari, S.E.
NIP : 19930609 201801 2 002
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi berupa pembuatan videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran mulai tanggal 28 Mei 2018 – 30 September 2018. Adapun dalam rangkaian kegiatan aktualisasi tersebut, diantaranya terdapat kegiatan pengunggahan videografis ke *website* Pusat Kajian Anggaran serta kegiatan sosialisasi videografis.

Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 Agustus 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : BK/14648/SETJEN DAN BK-DPR RI/PA/08/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

30 Agustus 2018

Yth

1. Kepala Biro Persidangan II;
 2. Kepala Bagian Sekretariat BAKN;
 3. Kasub TU Pusat Kajian Anggaran;
 4. Analis APBN dan Staf Pusat Kajian Anggaran;
 5. Analis APBN Non Fungsional Pusat Kajian Anggaran.
- Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Kajian Anggaran bermaksud mengundang Saudara/Saudari pada acara rapat koordinasi Pusat Kajian Anggaran dengan instansi pihak terkait yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Agustus 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran
Gedung Sekretariat Jenderal DPR Lantai 6
Acara : Rapat Koordinasi dengan tema Pengembangan Teknologi Informasi
(Videografis dan Kamus) di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si.
NIP. 19710911 199703 1 005

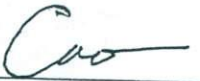

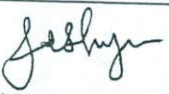



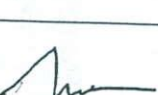
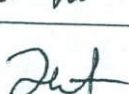






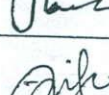





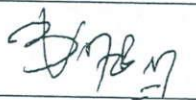







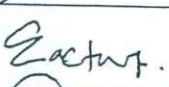
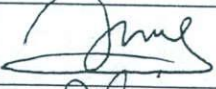

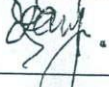

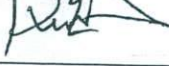
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR I
PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
DENGAN TEMA
"PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (VIDEOGRAFIS DAN KAMUS)
DI LINGKUNGAN PUSAT KAJIAN ANGGARAN DPR RI"**

Hari, tanggal : Jumat, 31 Agustus 2018
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR Lt.6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DR. ASEP AHMAD SAEFULOH, SE., M.SI.	KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
2.	CHOLIDA INDRYANA, S.H.	KEPALA BIRO PERSIDANGAN II	
3.	MARDI HARJO, S.E., M.SI.	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT BAKN	
4.	HUSNUL LATIFAH, S.SOS.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	
5.	SLAMET WIDODO, SE., ME	KORBID TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	
6.	RASTRI PARAMITA, SE., MM	KORBID PERENCANAAN DAN ASUMSI MAKRO	
7.	ROBBY ALEXANDER SIRAIT, SE., ME	KORBID BELANJA PEMERINTAH PUSAT	
8.	DWI RESTI PRATIWI, S.T., MPM	KORBID PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN	
9.	MARIHOT NASUTION, SE, M.SI	ANALIS APBN	
10.	ADHI PRASETYO SATRIO W., S.M.	ANALIS APBN	
11.	MARTHA CAROLINA, SE., AK., M.AK	ANALIS APBN	

12.	RATNA CHRISTIANINGRUM,S.SI,M.SI	ANALIS APBN	
13.	ADE NURUL AIDA,SE.	ANALIS APBN	
14.	DAHIRI, S.SI., M.SC	ANALIS APBN	
15.	JESLY YURIATY PANJAITAN,SE.,MM	ANALIS APBN	
16.	RENDY ALVARO, S.SOS	ANALIS APBN	
17.	Vita Puji Lestari, S.E.	ANALIS APBN BAKN	
18.	SITI RAHMAWATI, SE	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
19.	MEMED SOBARI	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
20.	MUSBIYATUN	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
21.	HILDA PISKA RANDINI, S.I.P.	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
22.	LARAS LINTANG ASMORO, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
23.	RIZA ADITYA SYAFRI, S AK	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
24.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
25.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
26.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
27.	ANISA FIRIA WULANINGTYAS, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
28.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
29.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
30.	MUJIBURRAHMAN, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	

31.	HIKMATUL FITRI, SE., M.Sc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
32.	DYAH MAYSARA, S.HUT	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
33.	FADILA PUTI LENGGO G, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
34.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
35.	OLLANI FABIOLA BANGUN, S.IP., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
36.	FEBRINA ELIA N, S.Pd., M.Sc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
37.	NURUL AZIZAH AZZAKIYYAH, SE., M.SC	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
38.	MATIUS WINARNO, SE., MBA	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
39.	EMILIA OCTAVIA, ST., M.Ak	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
40.	IRANISA, SE., M.Acc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
41.	RAHAYUNINGSIH, S.Pd	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
42.	DEASY DWI RAMIAYU, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
43.	DESSY MULYANTI	-	
44.	RAMA WARDIANSYAH	-	
45.			
46.			
47.			

LAPORAN SINGKAT RAPAT

Jenis Rapat	: Rapat Koordinasi Pusat Kajian Anggaran
Hari, Tanggal	: Jumat, 31 Agustus 2018
Pukul	: 09.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat	: R. Rapat Pusat Kajian Anggaran Lt. 6 Gd. Sekretariat Jenderal DPR-RI
Acara	: Pengembangan Teknoloi Informasi (Videografis dan Kamus) di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran DPR RI
Pimpinan Rapat	: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Sekretaris Rapat	: Hilda Piska Randini, S.I.P
Hadir	: 1. Analis APBN; 2. Kasubag TU Pusat Kajian Anggaran; 3. Staf TU Pusat Kajian Anggaran.

• PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas sumber daya manusa (SDM) Pusat Kajian Anggaran menjadi kebutuhan karena perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang selalu dinamis. Pembaharuan informasi, metode, dan *update* data sangat penting demi profesionalisme SDM Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan keahlian terkait anggaran kepada Anggota DPR RI.

Rapat koordinasi dibuka dan dipimpin oleh Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., diikuti Kasubag TU Pusat Kajian Anggaran, Analis APBN, Pranata Komputer serta Staf TU Pusat Kajian Anggaran. Selanjutnya, dilakukan diskusi dengan peserta rapat.

- **KESIMPULAN / KEPUTUSAN :**

Acara ini berlangsung dengan baik, dengan hasil dari diskusi sebagai berikut:

1. Memaparkan mengenai tujuan pembuatan videografis di Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu tugas prasyarat Diklatsar CPNS DPR RI;
2. Memaparkan maksud dan tujuan pembuatan videografis atas produk kajian di Pusat Kajian Anggaran yakni sebagai media penyajian alternatif selain media tekstual dan infografis dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca pengunjung website Pusat Kajian Anggaran;
3. Memaparkan secara singkat terkait penggunaan software videografis diantaranya terkait fitur, kelemahan dan kelebihan, dll;
4. Pemutaran videografis sebagai bentuk gambaran visual bagi pembaca;
5. Software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah animaker;
6. Software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah animaker. Software ini memungkinkan penggunaanya untuk membuat tampilan bergerak atas informasi yang ingin disampaikan. Software ini memadukan gaya presentasi yang memuat unsur audio dan visual yang dikemas secara kreatif.

- **PENUTUP**

Demikian acara Rapat Koordinasi dengan tema Pengembangan Teknologi Informasi (Videografis dan Kamus) di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran DPR RI Badan Keahlian DPR RI. Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

NIP. 19710911 199703 1 005

DOKUMENTASI: Sosialisasi videografis di Pusat Kajian Anggaran



Sosialisasi videografis di PKA pada Jumat, 31 Agustus 2018

LAMPIRAN KEGIATAN 6

Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Vita Puji Lestari, S.E.
 NIP : 19930609 201801 2 002
 Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
 Isu : Belum optimalnya minat baca Anggota DPR RI terhadap produk kajian di Pusat Kajian Anggaran
 Gagasan : Optimalisasi Penggunaan Videografis dalam menstimulus atensi pembaca produk kajian di Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 6 : Menyusun laporan realisasi kegiatan aktualisasi

PENYELESAIAN KEGIATAN	CATATAN MENTOR	TANGGAL /PARAF MENTOR
Tahapan Kegiatan : 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor; 2. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan kegiatan; 3. Menyusun Laporan Kegiatan; 4. Menyerahkan laporan kegiatan ke atasan.	SEMUA TAHAPAN SUDAH DIKERJAKAN DENGAN BAIK	28/9/18 Jrlw
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Laporan realisasi kegiatan aktualisasi	SUDAH	Jrlw
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Etika Publik; 2. Akuntabilitas; 3. Anti Korupsi.	KETICA SUBSTANSI MP SUDAH TERPENUHI	Jrlw
Kontribusi Terhadap Tusi Organisasi : Dengan melakukan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan maka, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai akuntabilitas yaitu transparansi dan pelaporan.	BERMANFAAT BAGI PELAKSANAAN TUSI ORGANISASI	Jrlw
Penguatan Nilai Organisasi : Dengan melakukan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan maka, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai akuntabilitas dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel.	BENTUK PELAKSANAAN NILAI AKUNTABEL	Jrlw


LEMBAR TESTIMONI

Nama : Vita Puji Lestari, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199306092018012002
Judul Kegiatan Aktualisasi : PEMBUATAN VIDEOGRAFIS PRODUK KAJIAN DI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Testimoni:

Videografis sangat informatif dan memudahkan orang memahami materi

TTD,


Febrina Elia N.

LEMBAR TESTIMONI

Nama : Vita Puji Lestari, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199306092018012002
Judul Kegiatan Aktualisasi : PEMBUATAN VIDEOGRAFIS PRODUK KAJIAN DI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Testimoni:

- Videografis produk kajian yang dibuat sangat menarik dan memudahkan saya dalam memahami kajian hanya dengan menonton videografis tersebut.
- Videografis yang dibuat sangat informatif

TTD,


Enrita Luluk 2.

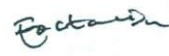
LEMBAR TESTIMONI

Nama : Vita Puji Lestari, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199306092018012002
Judul Kegiatan Aktualisasi : PEMBUATAN VIDEOGRAFIS PRODUK KAJIAN DI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Testimoni:

Proyek pembuatan videografis produk kajian sangat bagus, karena hal tersebut sangat terbaca dan mudah bagi PEA. Dengan adanya video grafis tersebut diharapkan anggota dapat lebih memahami hasil-hasil kajian dari PEA.

TTD,


Enrita Luluk 2.